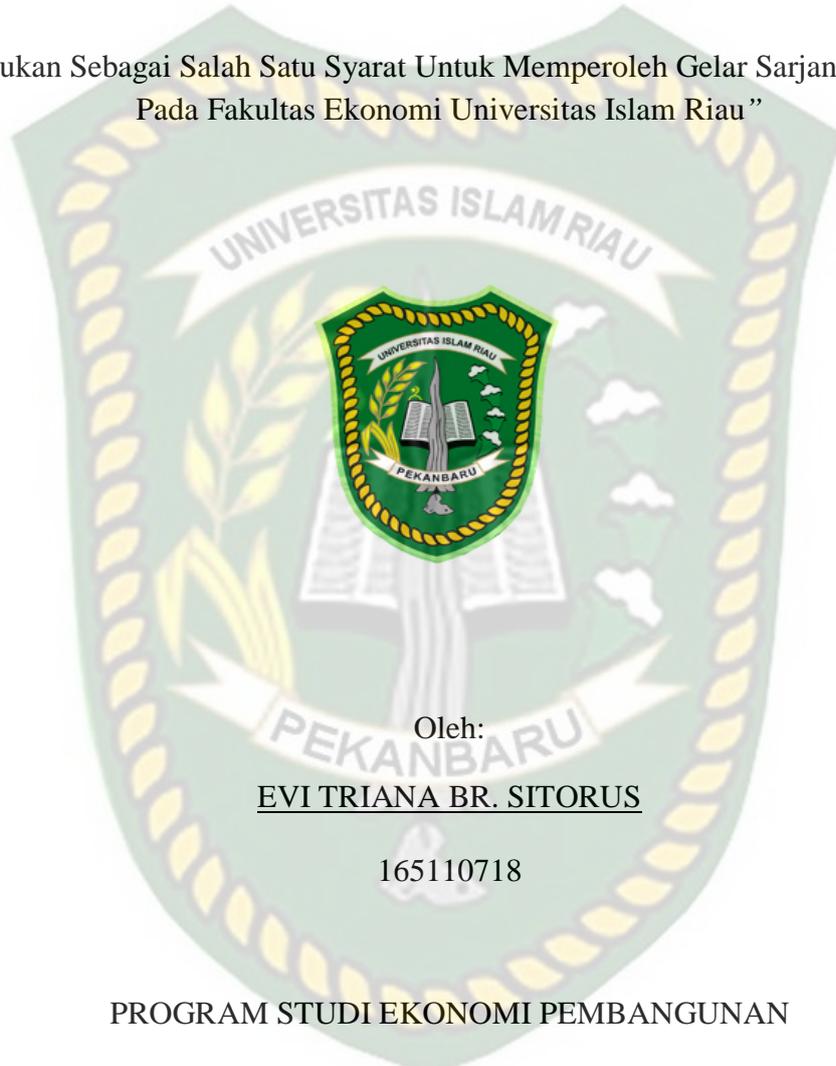


SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI INDONESIA

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau”



Oleh:

EVI TRIANA BR. SITORUS

165110718

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2020



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Alamat: JL. Kaharuddin Nasution No 113 Perhentian Marpoyan

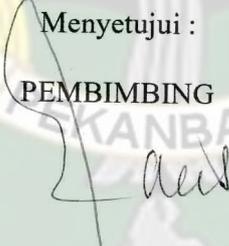
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : EVI TRIANA B. SITORUS  
NPM : 165110718  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS : EKONOMI  
JUDUL : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM PROVINSI DI  
INDONESIA

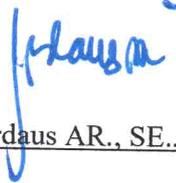
Menyetujui :

PEMBIMBING

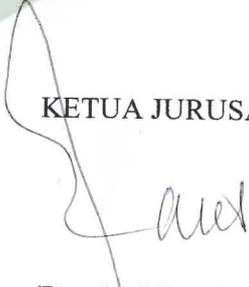
  
(Drs. M. Nur., MM)

Mengetahui :

DEKAN

  
(Drs. Firdaus AR., SE., M.Si., AK)

KETUA JURUSAN

  
(Drs. M. Nur., MM)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 2477/Kpts/FE-UIR/2019

TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1

*Bismillahirrohmanirrohim*

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang:
1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Ekonomi Pembangunan Tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa
  2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

- Mengingat
1. Surat Mendikbud RI:
    - a. Nomor: 0880/U/1997
    - b. Nomor: 0213/0/1987
    - c. Nomor: 0378/U/1986
    - d. Nomor: 0387/U/1987
  2. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
    - a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
    - b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
    - c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
    - d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
  3. Surat Keputusan YI PI Daerah Riau
    - a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
    - b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
  4. Statuta Universitas Islam Riau tahun 2013
  5. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
    - a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

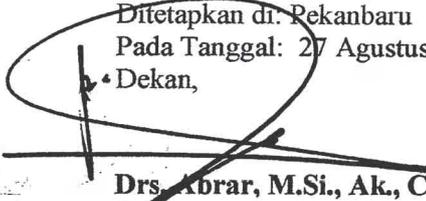
**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan penyusunan
1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai pembimbing dalam skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Colongan	Keterangan
1.	Drs. M. Nur, MM	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:  
N a m a : Evi Triana Br. Sitorus  
N P M : 165110718  
Jurusan/Jenjang Pendd.: Ekonomi Pembangunan / S1  
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi upah minimum Provinsi ( UMP) DI Indonesia.
3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas islam Riau.
4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.  
Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru  
Pada Tanggal: 27 Agustus 2019  
Dekan,

  
Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau

2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : EVI TRIANA BR. SITORUS  
TEMPAT/TGL LAHIR : DAYUN/ 13 MARET 1998  
NPM : 165110718  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM PROVINSI  
(UMP) DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil karya orang lain (**bukan plagiat/duplikasi**) dan sistematika penulisannya sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut atau dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2020



EVY TRIANA BR. SITORUS

## ABSTRAK

### ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI INDONESIA OLEH:

EVI TRIANA BR. SITORUS

NPM. 165110718

(Dosen Pembimbing: Drs. M. Nur, MM)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum provinsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam pengolahan hasil penelitian metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dimana metode tersebut digunakan untuk mengukur variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  $R^2$  sebesar 0.749098. hal tersebut berarti bahwa sebesar 74,9% variabel bebas (indeks harga konsumen, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto) sudah mewakili untuk menjelaskan variabel terikat (upah minimum provinsi). Sedangkan sisanya sebesar 25,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Kemudian dilihat dari nilai koefisien variabel bebas dan uji T (Parsial) dapat diketahui bahwa variabel indeks harga konsumen ( $X_1$ ) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi (Y) di Indonesia, selanjutnya variabel angkatan kerja ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi (Y) di Indonesia, dan yang terakhir yaitu variabel produk domestik regional bruto ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi (Y) di Indonesia. Sedangkan berdasarkan uji F (Simultan) ketiga variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap upah minimum provinsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Upah Minimum Provinsi, Indeks Harga Konsumen, Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto.

## ABSTRACT

### AN ANALYSIS ON FACTORS THAT AFFECTING THE PROVINCIAL MINIMUM WAGE IN INDONESIA BY:

EVI TRIANA BR. SITORUS

165110718

(Consultant: Drs. M. nur, MM)

*This research aims to find out the factors that affect the provincial minimum wage in Indonesia. The data used in this research is secondary data. In processing the research result the data analysis method used is the multiple regression analysis method where the method is used to measure the independent variable on the dependent variable. The results showed that the  $R^2$  of 0.749098 meant that 74,9% of the independent variable (the index of consumer prices, the labor force, and gross regional domestic product) already represent to explain the dependent variable (provincial minimum wage). While the remaining 25,1% is explained by other variables outside the model. Then seen from the coefficient value of the independent variable and t- test (partial) it can be seen that the consumer price index variable ( $X_1$ ) has a negative and significant effect on the provincial minimum wage ( $Y$ ) in Indonesia, then the labor force variable ( $X_2$ ) has a positive and significant effect on the provincial minimum wage ( $Y$ ) in Indonesia, and finally the gross regional domestic product variable ( $X_3$ ) has a positive and significant effect on the provincial minimum wage ( $Y$ ) in Indonesia. Whereas based on the f-test the three independent variables simultaneously have a significant effect on the provincial minimum wage in Indonesia.*

*Keywords: The provincial minimum wage, the index of consumer prices, the labor force, and the gross regional domestic product.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan ini dengan judul, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI INDONESIA”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi.

Pada kesempatan ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasihat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Drs. Firdaus AR., S.E., M.Si., AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Ibu Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih., M.si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. M. Nur, MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau.
5. Ibu Sinta Yulyanti S.E., M. Ec., Dev selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau.

6. Bapak Drs. M. Nur, MM selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu para dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
8. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau khususnya pada Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi.
9. Terkhusus kepada Ayahanda Lamhot Sitorus dan Ibunda Rustina Br. Hutabarat atas doa dan kerja keras serta cinta dan kasih sayang yang tidak pernah putus serta kakakku Ritania Monica S.Si, dan Kartika Br. Sitorus S.AP, abangku Antonio Fernando Sitorus SH, dan adikku Hisar Samuel yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan semangat yang tiada terhingga.
10. Kepada teman-teman terbaikku Sara Elprida, Nora Lidya Febriana, Dwi Kriswahyuni, dan Arjuna Fernando Purba yang selalu memberikan semangat dan waktu untuk mendukung penulis menyelesaikan studi.
11. Kepada teman-teman SMA ku Yenni Erika Sari Amd. Keb, Junita Manullang A.M.T, Queen Monaladisa Marpaung Amd.sos, dan Ramayanti yang telah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan ini.

12. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2016, terima kasih atas semua suka dan duka kita pada masa kuliah serta telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Semoga Tuhan Yesus Kristus melimpahkan kasih dan berkat-Nya kepada semua orang yang telah memberikan pertolongan diatas.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat yang cukup berarti bagi setiap pembacanya.

Terima Kasih

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis

Evi Triana Br. Sitorus

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	Ii
KATA PENGANTAR.....	Iii
DAFTAR ISI.....	Vi
DAFTAR TABEL.....	Ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	10
2.1.1. Konsep Upah.....	10
2.1.2. Konsep Upah Minimum Provinsi.....	13
2.1.3. Konsep Indeks Harga Konsumen.....	16
2.1.4. Konsep Angkatan Kerja.....	17
2.1.5. Konsep Produk Domestik Regional Bruto.....	18
2.1.6. Isu Keterkaitan Variabel IHK, AK, dan PDRB Terhadap UMP.....	21

a. Pengaruh IHK Terhadap UMP.....	21
b. Pengaruh AK Terhadap UMP.....	22
c. Pengaruh PDRB Terhadap UMP.....	22
2.2. Penelitian Terdahulu.....	23
2.3. Hipotesis.....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Lokasi Penelitian.....	25
3.2. Populasi dan Sampel.....	25
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5. Definisi Variabel Penelitian.....	26
3.6. Metode Analisis Data.....	27
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>	
4.1. Sejarah Singkat Negara Republik Indonesia.....	33
4.2. Letak Geografis dan Luas Wilayah Indonesia.....	39
4.3. Wilayah Administrasi Pemerintah Indonesia.....	42
4.4. Perkembangan Penduduk Indonesia.....	42
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1. Hasil Penelitian.....	45
5.1.1. Variabel Indeks Harga Konsumen.....	45
5.1.2. Variabel Angkatan Kerja.....	47
5.1.3. Variabel Produk Domestik Regional Bruto.....	49
5.1.4. Analisis Statistik Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi Di Indonesia.....	52

5.1.5. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	56
5.1.6. Uji F.....	56
5.1.7. Uji T (Parsial).....	57
5.1.8. Uji Asumsi Klasik.....	58
5.2. Pembahasan.....	62
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1. Kesimpulan.....	66
6.2. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2009-2018 (Jiwa).....	2
Tabel 1.2 Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018 (Rp).....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Luas Provinsi di Indonsia Tahun 2018.....	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2018.....	43
Tabel 5.1 Indeks Harga Konsumen Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2009-2018 (%).....	45
Tabel 5.2 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018 (jiwa).....	48
Tabel 5.3 Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018 (Juta Rupiah).....	50
Tabel 5.4 Uji Chow.....	53
Tabel 5.5 Hasil Uji Hausmann.....	53
Tabel 5.6 Hasil Estimasi Pengaruh IHK, AK, Dan PDRB Terhadap Upah Minimum Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018.....	54
Tabel 5.8 Hasil Uji Multikolinieritas.....	59
Tabel 5.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	60

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas.....	58
Gambar 5.2 Hasil Uji Autokorelasi.....	62



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Ekonomi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yang merujuk kepada “pihak yang mengelola rumah tangga”, dimana setiap rumah tangga harus mengalokasikan sumber-sumber dayanya yang langka kesegnap anggotanya dengan memperhitungkan kemampuan, daya upaya, dan keinginan dari setiap anggota tersebut (Mankiw 2012:3). Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan itu adalah salah satu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat/ bangsa (Putra 2018:44). Pengertian konsep pembangunan yang paling mudah dan populer ialah kemakmuran ekonomi. Ekonomi Pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi dinegara-negara sedang berkembang, dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi (Sukirno 2006:3). Ekonomi pembangunan juga merupakan hal penting yang wajib diupayakan oleh semua daerah untuk kepentingan bersama, karna kebijakan tersebut merupakan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diberlakukannya upah minimum sarannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum angkatan kerja dan keluarganya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2019) jumlah angkatan kerja di Indonesia yaitu 136,18 juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah angkatan kerja di Indonesia, tidak semua yang memiliki pekerjaan karena terbatasnya lapangan

pekerjaan yang tersedia juga menyatakan bahwa terbatasnya jumlah permintaan tenaga kerja. Angkatan kerja (*laborforce*) merupakan jumlah dari orang yang sedang bekerja dan orang yang menganggur, dan tingkat pengangguran (*unemployment rate*) diartikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja (Mankiw 2006:35).

Tabel 1.1: Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2009-2018 (Jiwa)

NO	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	1.897.922	1.938.519	1.967.412	1.988.483	2.050.076
2	Sumatera Utara	6.298.070	6.617.377	6.026.020	6.274.874	6.500.750
3	Sumatera Barat	2.172.002	2.194.040	2.230.622	2.234.007	2.216.687
4	Riau	2.260.862	2.377.494	2.461.112	2.509.501	2.623.310
5	Jambi	1.334.496	1.545.683	1.461.213	1.484.033	1.467.007
6	Sumatera Selatan	3.460.365	3.665.044	3.658.951	3.796.829	3.704.132
7	Bengkulu	829.449	855.026	867.699	885.815	872.233
8	Lampung	3.627.155	3.957.697	3.598.090	3.709.599	3.681.084
9	KEP.BangkaBelitung	539.410	620.063	577.539	606.298	620.270
10	KEP. Riau	681.769	826.535	806.711	844.409	854.150
11	DKI Jakarta	4.687.727	5.272.604	5.128.104	5.339.994	5.108.943
12	Jawa Barat	18.981.260	18.893.835	19.334.053	20.474.894	20.620.610
13	Jawa Tengah	17.087.649	16.856.330	17.026.107	17.513.488	17.524.022
14	DI Yogyakarta	2.016.694	1.882.296	1.924.318	1.983.542	1.949.243
15	Jawa Timur	20.338.568	19.527.051	19.513.939	20.167.517	20.432.453
16	Banten	4.357.240	5.309.462	5.072.921	5.177.151	5.181.796
17	Bali	2.123.588	2.246.149	2.224.874	2.300.705	2.283.896
18	Nusa Tenggara Barat	2.098.638	2.252.076	2.083.445	2.126.849	2.146.002
19	Nusa Tenggara Timur	2.250.128	2.132.381	2.097.545	2.186.713	2.175.171
20	Kalimantan Barat	2.200.895	2.197.325	2.262.339	2.276.975	2.262.732
21	Kalimantan Tengah	1.047.402	1.066.733	1.118.644	1.148.275	1.158.834
22	Kalimantan Selatan	1.821.717	1.840.296	1.895.277	1.934.310	1.900.350
23	Kalimantan Timur	1.460.996	1.648.455	1.717.703	1.766.900	1.742.380
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	1.051.130	1.036.574	1.060.730	1.057.416	1.035.772
26	Sulawesi Tengah	1.215.727	1.220.454	1.299.834	1.274.460	1.293.332
27	Sulawesi Selatan	3.536.920	3.571.317	3.621.417	3.639.821	3.558.183
28	Sulawesi Tenggara	998.195	1.045.899	1.001.983	1.037.479	1.042.947
29	Gorontalo	447.313	456.499	477.420	476.634	478.813
30	Sulawesi Barat	511.144	532.171	555.775	584.694	558.574
31	Maluku	596.030	651.339	693.932	664.607	668.721
32	Maluku Utara	422.398	437.758	450.539	472.998	472.965
33	Papua Barat	352.385	342.888	355.011	367.493	376.081
34	Papua	1.128.036	1.510.176	1.526.422	1.542.971	1.610.484

## Lanjutan

NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	2.123.312	2.182.824	2.257.943	2.288.777	3.353.440
2	Sumatera Utara	6.272.083	6.391.098	6.362.909	6.743.277	7.124.458
3	Sumatera Barat	2.331.993	2.346.163	2.473.814	2.483.675	2.552.130
4	Riau	2.695.247	2.771.349	2.987.952	2.965.585	3.108.398
5	Jambi	1.570.822	1.620.752	1.692.193	1.724.633	1.790.437
6	Sumatera Selatan	3.885.674	3.934.787	4.178.794	4.123.669	4.138.957
7	Bengkulu	900.054	951.007	997.913	969.255	998.524
8	Lampung	3.857.936	3.832.108	4.121.668	4.072.487	4.232.066
9	KEP.BangkaBelitung	636.959	665.842	705.173	699.017	727.918
10	KEP. Riau	878.415	891.988	931.435	966.091	970.132
11	DKI Jakarta	5.063.479	5.092.219	5.178.839	4.856.116	5.041.620
12	Jawa Barat	21.006.139	20.586.356	21.075.899	22.391.003	22.628.122
13	Jawa Tengah	17.547.026	17.298.925	17.312.466	18.010.612	18.059.895
14	DI Yogyakarta	2.023.461	1.971.463	2.099.436	2.117.187	2.191.742
15	Jawa Timur	20.149.998	20.274.681	19.953.846	20.937.716	21.300.423
16	Banten	5.338.045	5.334.843	5.587.093	5.596.963	5.829.228
17	Bali	2.316.758	2.372.015	2.463.039	2.434.450	2.525.355
18	Nusa Tenggara Barat	2.221.810	2.255.879	2.464.331	2.396.196	2.237.381
19	Nusa Tenggara Timur	2.247.438	2.307.737	2.353.648	2.398.609	2.486.281
20	Kalimantan Barat	2.320.229	2.357.224	2.388.758	2.408.259	2.451.399
21	Kalimantan Tengah	1.193.171	1.272.461	1.311.427	1.276.669	1.355.399
22	Kalimantan Selatan	1.941.229	1.987.250	2.078.384	2.074.117	2.116.944
23	Kalimantan Timur	1.811.129	1.539.491	1.717.892	1.654.964	1.732.598
24	Kalimantan Utara	-	283.102	288.522	330.731	341.197
25	Sulawesi Utara	1.060.752	1.099.272	1.183.721	1.121.309	1.175.809
26	Sulawesi Tengah	1.342.615	1.384.235	1.509.505	1.428.583	1.502.972
27	Sulawesi Selatan	3.715.801	3.706.128	3.881.003	3.812.358	3.988.029
28	Sulawesi Tenggara	1.085.509	1.138.045	1.253.624	1.200.605	1.248.212
29	Gorontalo	500.056	517.788	562.196	547.766	578.880
30	Sulawesi Barat	608.446	616.549	645.671	614.748	639.622
31	Maluku	672.304	727.259	743.149	707.796	755.034
32	Maluku Utara	481.504	513.601	524.526	516.231	541.446
33	Papua Barat	398.424	413.635	434.817	430.478	445.630
34	Papua	1.675.113	1.741.945	1.722.162	1.762.841	1.835.963

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, Sakernas, 2019

Indonesia juga merupakan sebuah negara yang wilyahnya terbagi atas 34 provinsi. Seperti tabel diatas, masing-masing provinsi diseluruh Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang berbeda-beda dan perubahan setiap tahunnya cukup berfluktuatif. Di masing-masing provinsi menetapkan upah minimum yang berbeda-beda pula, hal ini tergantung karakteristik dari masing-masing provinsi dan juga karakteristik masing-masing angkatan kerja. Dari sudut pandang karakteristik provinsi, tiap provinsi yang produktif dalam industri akan

menduduki tingkat upah minimum yang tinggi, dan sebaliknya provinsi yang tingkat produktivitasnya dalam industri rendah maka tingkat upah minimum juga rendah. Sedangkan dari sudut karakteristik masing-masing tenaga kerja, upah minimum dipahami dengan menggunakan perbedaan kemampuan, keahlian, pendidikan, dan penawaran tenaga kerja. Jika tenaga kerja dengan tingkat pengalaman yang rendah, akan mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah, sedangkan pekerja dengan keahlian yang tinggi akan mendapatkan upah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dan dari sisi penawaran tenaga kerja yang dimaksud adalah jika tingkat suatu penawaran tenaga kerja disuatu daerah diketahui maka dapat ditentukan pula upah yang layak bagi tenaga kerja.

Tabel 1.2: Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018 (Rp)

No	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.550.000
2	Sumatera Utara	905.000	965.000	1.035.500	1.200.000	1.375.000
3	Sumatera Barat	880.000	940.000	1.055.000	1.150.000	1.350.000
4	Riau	901.600	1.016.000	1.120.000	1.238.000	1.400.000
5	Jambi	800.000	900.000	1.028.000	1.142.500	1.300.000
6	Sumatera Selatan	824.730	927.825	1.084.440	1.195.220	1.630.000
7	Bengkulu	735.000	780.000	815.000	930.000	1.200.000
8	Lampung	691.000	767.500	855.000	975.000	1.150.000
9	KEP.BangkaBelitung	850.000	910.000	1.024.000	1.110.000	1.265.000
10	KEP. Riau	892.000	925.000	975.000	1.015.000	1.365.087
11	DKI Jakarta	1.069.865	1.118.009	1.290.000	1.529.150	2.200.000
12	Jawa Barat	628.191	671.500	732.000	780.000	850.000
13	Jawa Tengah	575.000	660.000	675.000	765.000	830.000
14	DI Yogyakarta	700.000	745.694	808.000	892.660	947.114
15	Jawa Timur	570.000	630.000	705.000	745.000	866.250
16	Banten	917.500	955.300	1.000.000	1.042.000	1.170.000
17	Bali	760.000	829.316	890.000	967.500	1.181.000
18	Nusa Tenggara Barat	832.500	890.775	950.000	1.000.000	1.100.000
19	Nusa Tenggara Timur	725.000	800.000	850.000	925.000	1.010.000
20	Kalimantan Barat	705.000	741.000	802.500	900.000	1.060.000
21	Kalimantan Tengah	873.089	986.590	1.134.580	1.327.459	1.553.127
22	Kalimantan Selatan	930.000	1.024.500	1.126.000	1.225.000	1.337.500
23	Kalimantan Timur	955.000	1.002.000	1.084.000	1.177.000	1.752.073
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-

No	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013
25	Sulawesi Utara	929.500	1.000.000	1.050.000	1.250.000	1.550.000
26	Sulawesi Tengah	720.000	777.500	827.500	885.000	995.000
27	Sulawesi Selatan	905.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.440.000
28	Sulawesi Tenggara	770.000	860.000	930.000	1.032.300	1.125.207
29	Gorontalo	675.000	710.000	762.500	837.500	1.175.000
30	Sulawesi Barat	909.400	944.200	1.006.000	1.127.000	1.165.000
31	Maluku	775.000	840.000	900.000	975.000	1.275.000
32	Maluku Utara	770.000	847.000	889.350	960.498	1.200.622
33	Papua Barat	1.180.000	1.210.000	1.410.000	1.450.000	1.720.000
34	Papua	1.216.100	1.316.500	1.403.000	1.585.000	1.710.000

## Lanjutan

No	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	1.750.000	1.900.000	2.118.500	2.500.000	2.717.500
2	Sumatera Utara	1.505.850	1.625.000	1.811.875	1.961.354	2.131.991
3	Sumatera Barat	1.490.000	1.615.000	1.800.725	1.961.354	2.118.871
4	Riau	1.700.000	1.878.000	2.095.000	2.266.722	2.463.928
5	Jambi	1.502.300	1.710.000	1.906.650	2.063.000	2.242.481
6	Sumatera Selatan	1.825.000	1.974.346	2.206.000	2.388.000	2.595.756
7	Bengkulu	1.350.000	1.500.000	1.605.000	1.737.412	1.880.510
8	Lampung	1.399.037	1.581.000	1.763.000	1.908.447	2.074.481
9	KEP. Bangka Belitung	1.640.000	2.100.000	2.341.500	2.538.673	2.755.189
10	KEP. Riau	1.665.000	1.954.000	2.178.710	2.358.454	2.563.639
11	DKI Jakarta	2.441.000	2.700.000	3.100.000	3.555.750	3.647.700
12	Jawa Barat	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.420.624	1.544.218
13	Jawa Tengah	910.000	910.000	910.000	1.367.000	1.485.929
14	DI Yogyakarta	988.500	988.500	988.500	1.337.645	1.454.020
15	Jawa Timur	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.388.000	1.508.756
16	Banten	1.325.000	1.600.000	1.784.000	1.931.180	2.099.192
17	Bali	1.542.600	1.621.172	1.807.600	1.956.727	2.126.962
18	Nusa Tenggara Barat	1.210.000	1.330.000	1.482.950	1.631.245	1.773.163
19	Nusa Tenggara Timur	1.150.000	1.250.000	1.425.000	1.525.000	1.793.550
20	Kalimantan Barat	1.380.000	1.560.000	1.739.400	1.882.900	2.046.712
21	Kalimantan Tengah	1.723.970	1.896.367	2.057.558	2.227.307	2.416.385
22	Kalimantan Selatan	1.620.000	1.870.000	2.085.050	2.258.000	2.454.446
23	Kalimantan Timur	1.886.315	2.026.126	2.161.253	2.354.800	2.543.097
24	Kalimantan Utara	-	2.026.126	2.175.340	2.358.000	2.564.015
25	Sulawesi Utara	1.900.000	2.150.000	2.400.000	2.598.000	2.824.026
26	Sulawesi Tengah	1.250.000	1.500.000	1.670.000	1.807.775	1.965.051
27	Sulawesi Selatan	1.800.000	2.000.000	2.250.000	2.435.625	2.717.500
28	Sulawesi Tenggara	1.400.000	1.652.000	1.850.000	2.002.625	2.176.853
29	Gorontalo	1.325.000	1.600.000	1.875.000	2.030.000	2.206.610
30	Sulawesi Barat	1.400.000	1.655.500	1.864.000	2.017.780	2.193.326
31	Maluku	1.415.000	1.650.000	1.775.000	1.925.000	2.092.475
32	Maluku Utara	1.440.746	1.557.617	1.681.266	1.975.000	2.146.825
33	Papua Barat	1.870.000	2.015.000	2.237.000	2.421.500	2.627.121
34	Papua	2.040.000	2.193.000	2.435.000	2.663.646	2.895.383

Sumber: BPS Indonesia, Kemenakertrans, 2019

Seperti pada tabel Upah Minimum Provinsi (UMP) diatas menunjukkan bahwa jumlah upah minimum yang ada di Indonesia memiliki perbedaan di tiap-tiap provinsinya, dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2009, Provinsi Papua merupakan provinsi yang memiliki upah minimum tertinggi yaitu Rp1.216.100, sedangkan yang memiliki upah minimum terendah pada tahun yang sama adalah Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp570.000. Pada tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum tertinggi yaitu sebesar Rp3.647.600, sedangkan yang memiliki upah minimum terendah pada tahun yang sama yaitu Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar Rp1.454.020.

Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai upah minimum yaitu pandangan dari pihak pekerja melalui FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), dan pandangan dari pihak pengusaha melalui APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Perbedaan pandangan ini dapat dilihat dari perselisihan antara serikat pekerja yang menghendaki kenaikan upah minimum agar bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya, sementara kelompok pengusaha melihat bahwa tuntutan ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 tertulis bahwa “*Gubernur wajib menetapkan UMP*” dan “*Perhitungan UMP dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum dilaksanakan oleh dewan pengupahan provinsi*”. Pemerintah telah membuat peraturan tentang pengupahan untuk karyawan atau buruh agar memenuhi kebutuhan hidup minimum. Penetapan

dan peningkatan tingkat upah minimum dilaksanakan setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jumlah tingkat output yang diproduksi disebut dengan PDRB. PDRB merupakan hal penting yang dipakai sebagai syarat penetapan nilai upah minimum karena tingkat output yang diproduksi akan berpengaruh terhadap laba yang akan dihasilkan. Peningkatan tingkat upah tiap tahunnya merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan, agar dapat mengimbangi dengan peningkatan harga-harga barang kebutuhan sehingga dapat mempertahankan standar hidup.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI INDONESIA”

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK), Angkatan Kerja (AK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia?”

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah “Mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK), Angkatan Kerja (AK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia”

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu antara lain:

1. Memberikan bantuan pemikiran dan masukan untuk pemerintah dan instansi yang terkait dalam membuat kebijakan dan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia.
2. Menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam masalah yang sama dimasa yang akan datang.
3. Wacana untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan dibagi menjadi enam bab, dengan susunan sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang merupakan teori pendukung dalam penulisan skripsi ini dan hipotesis.

##### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

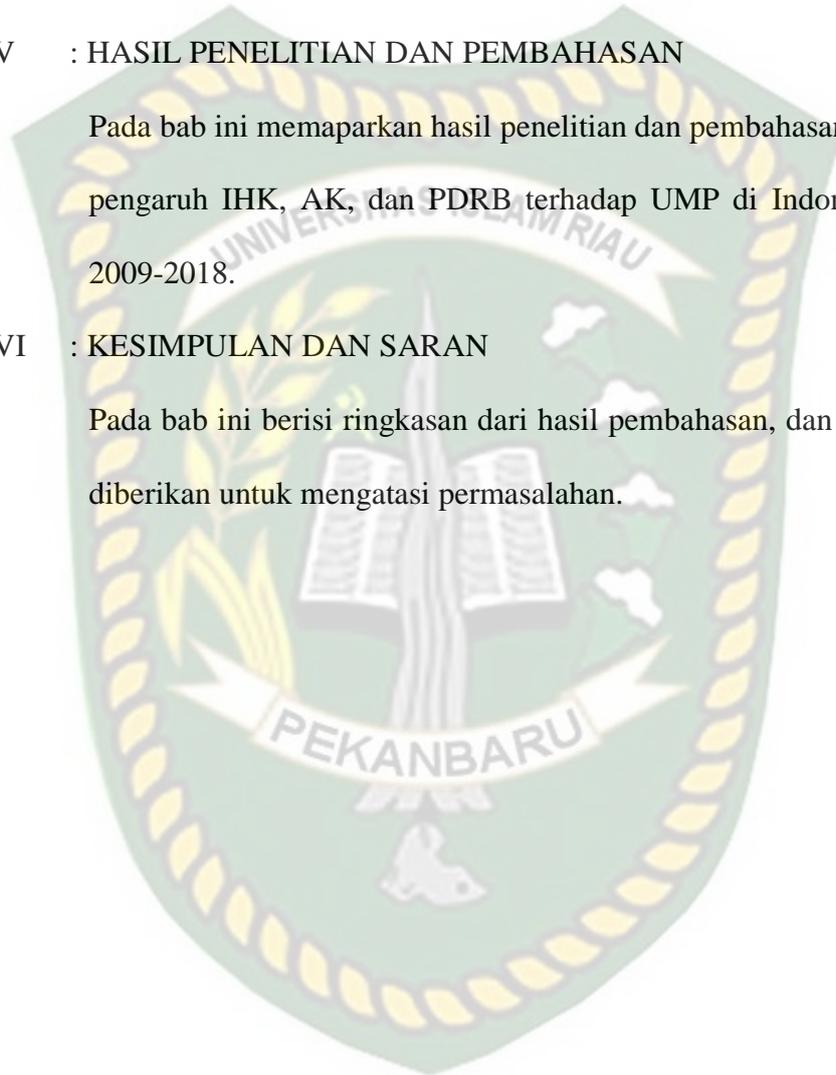
Pada bab ini menjelaskan secara umum lokasi penelitian, penjelasan ini berkaitan dengan tema penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh IHK, AK, dan PDRB terhadap UMP di Indonesia tahun 2009-2018.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi ringkasan dari hasil pembahasan, dan saran yang diberikan untuk mengatasi permasalahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Konsep Upah

Menurut Sukirno (2015) upah diartikan sebagai pembayaran keatas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Upah ialah hak para pekerja yang diterima dan juga dinyatakan dalam bentuk uang yang merupakan suatu imbalan dari pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah ditetapkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Upah diartikan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan semua. Upah juga diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada buruh atas pelayanan yang diberikan dalam memproduksi kekayaan.

Pengertian upah yang dikemukakan oleh Dewan Pengupahan Nasional adalah penerimaan merupakan imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang, dan peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

Dari kacamata tenaga kerja upah dianggap sebagai sumber penghasilan pokok atau disebut *human income*. Sebagai sumber pendapatan, tenaga kerja

sangat ingin agar upah mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, tenaga kerja mempunyai beberapa konsep tersendiri tentang seberapa tinggi tingkat upah sebaiknya, yaitu: (1) tingkat upah perlu mencukupi kebutuhan, dan (2) tingginya sesuai yang di inginkan agar sesuai dengan harapan ekonomis. Kebutuhan hidup seseorang biasanya tidak hanya harus mencukupi kebutuhan bagi dirinya sendiri, melainkan juga untuk seluruh anggota keluarga yang terdiri dari istri dan anak-anaknya. Seperti kita ketahui menentukan luasnya kebutuhan seseorang tidaklah mudah, apalagi sebuah keluarga yang dapat dikatakan benar-benar memenuhi kebutuhan. Kriteria keutuhan dasar (*basic needs*) pun masih sangat relatif dan dengan sendirinya bervariasi (Arfida, 2003).

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bab I Pasal I Ayat 30 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Menurut Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan/upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Didalam jangka panjang kemampuan upah pekerja akan semakin sedikit atau lemah didalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Hal seperti ini timbul akibat dari kenaikan harga-harga dari barang dan jasa tersebut, yang selalu berlaku dari waktu ke waktu. Kenaikan dari harga-harga tersebut akan menurunkan daya beli dari sejumlah pendapatan tertentu. Didalam jangka panjang kecenderungan yang

selalu berlaku adalah keadaan dimana harga-harga barang maupun upah terus-menerus mengalami kenaikan. Namun kenaikan tersebut tidaklah serentak dan juga tingkat kenaikannya berbeda pula. Meskipun hal ini tidak menimbulkan kesulitan untuk mengetahui sampai dimana kenaikan pendapatan merupakan suatu gambaran dari kenaikan kesejahteraan yang dinikmati oleh para pekerja. Untuk mencapai tujuan itu para ahli ekonom membuat perbedaan diantara dua pengertian upah: Upah uang dan upah riil. Upah uang merupakan jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi, Sedangkan upah riil merupakan tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja (Sukirno 2015:351).

Namun, dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar dibawah lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 90 ayat 1 UU No. 13/2003). Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari pada upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (Pasal 91 ayat 2 UU No. 13/2003). Untuk mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi kehidupan yang layak, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang akan melindungi pekerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat 3(a) tentang ketenagakerjaan “Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi upah minimum”

### 2.1.2 Konsep Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum sebagaimana diatur dalam PP No.78/2015 merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan dan upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum merupakan suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Adapun pemenuhan kebutuhan yang layak disetiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi (UMP).

Menurut Setiaji dan Sudarsono (dalam Karno, 2018:22) mengatakan bahwa terdapat dua sistem penetapan upah minimum di Indonesia. Beberapa provinsi atau daerah menetapkan upah minimum tunggal dan beberapa menetapkan upah minimum sektoral. Upah minimum tunggal bersifat kaku yang pada umumnya berdampak pada perbaikan upah pekerja tetap pada industri marginal. Sedangkan upah minimum sektoral mengurangi dampak kekakuan upah, karena harga (upah) terdeferensiasi sedemikian rupa sehingga dapat mawadahi berbagai industri yang berbeda dalam produktivitas, jaringan pasar, sumber modal sebagai ukuran perusahaan, penggunaan kapital dan akhirnya berbeda dalam Return On Investment (ROI).

Menurut Sumarsono (2009) pemerintah telah mengembangkan penerapan upah minimum dengan sasarannya supaya upah minimum itu paling sedikit cukup menutupi kebutuhan hidup minimum karyawan dan keluarganya. Dengan

demikian, kebijaksanaan penentuan upah minimum adalah: (a) menjamin penghasilan karyawan sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (b) meningkatkan produktivitas kerja karyawan, (c) mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien.

Menurut Prasetyo (dalam Karno, 2018:22) Penetapan upah minimum pada suatu daerah memiliki tujuan untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Untuk penetapan upah minimum dilakukan oleh gubernur sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 89 ayat 3 yaitu: *upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau Bupati/ Walikota*. Begitu juga dengan ayat 4, yaitu: *Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan keputusan menteri*.

Pada pasal 92 ayat 1 sampai 3: *Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja pendidikan dan kompetensi. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dari produktivitas. Ketentuan mengenai struktur dan skala upah diatur dengan keputusan menteri*.

Pengertian diatas memiliki makna timbal balik dari pengusaha kepada karyawan, dimana hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya tersebut didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau Undang-Undang dimana ruang lingkupnya mencakup kesejahteraan keluarganya.

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa Upah Minimum hanya ditujukan bagi pekerja yang dimana dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Adapun 2 unsur terpenting yang terdapat dari definisi upah minimum, antara lain:

1. Upah permulaan ialah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja
2. Jumlah Upah Minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan, dan keperluan rumah tangga.

Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan “living wage” yang artinya orang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah Minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang low skilled. Upah Minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.

Tingkat Upah minimum ditentukan oleh empat pihak yang saling terkait yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen yang terdiri dari pakar, praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja, dan wakil pengusaha melalui APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Mereka bertugas mengelola tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu.

### 2.1.3 Konsep Indeks Harga Konsumen (IHK)

Menurut Mankiw, Quah, dan Wilson (2012), Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. IHK mengukur perubahan-perubahan pada biaya hidup. Dengan kata lain, indeks harga konsumen mencoba mengukur berapa banyak penghasilan yang harus dinaikkan guna memelihara standar hidup yang kosntan. Ahli statistik pemerintah secara rutin menghitung dan melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK diperoleh dengan menghitung harga barang-barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam suatu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen. Perhitungan IHK dilakukan untuk merekam perubahan harga beli ditingkat konsumen (purchasing cost) dari sekelompok tetap barang dan jasa (fixed basket) yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam memperhitungan IHK antara lain, yaitu:

- a. Tentukan isi keranjangnya.  
Menentukan harga-harga yang paling penting bagi konsumen tertentu.
- b. Tentukan harga-harganya.  
Menentukan harga setiap barang dan jasa dalam keranjang untuk setiap masa waktu.
- c. Hitunglah harga seluruh isi keranjang.

Menggunakan data harga-harga untuk menghitung jumlah harga keseluruhan isi keranjang barang dan jasa dari waktu ke waktu.

- d. Pilihlah tahun basis dan menghitung indeksinya.

Memilih satu tahun dari tahun basis yang merupakan tolak ukur yang menjadi bandingan tahun-tahun yang lainnya. Untuk menghitung indeksinya, harga barang dan jasa untuk setiap tahun dibagi dengan harga keranjang pada tahun basis. Perbandingan tersebut lalu dikali dengan 100. Maka hasilnya ialah indeks harga konsumen.

- e. Hitunglah laju inflasi.

Menggunakan indeks harga konsumen untuk menghitung laju inflasi yang merupakan perubahan persentase pada indeks harga dari periode sebelumnya, yaitu laju laju inflasi antara dua tahun yang berurutan.

#### 2.1.4 Konsep Angkatan Kerja (AK)

Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Simanjuntak, 2006). Didalam pengertian tenaga kerja, tenaga kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dalam suatu sektor perekonomian digambarkan sebagai penawaran tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja. Angkatan kerja dibedakan menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan penganggur. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu sedang tidak bekerja. Dikategorikan sebagai pekerja apabila

waktu minimum bekerja yaitu selama satu jam selam seminggu yang lalu untuk kegiatan produktif sebelum pencacahan dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau berusaha mencari kerja dan belum bekerja minimal satu jam selama seminggu yang lalu sebelum dilakukan pencacahan.

Berdasarkan aktifitasnya, maka angkatan kerja dapat dibedakan atas dua golongan yaitu:

- a. Angkatan kerja sekunder, yaitu mereka yang secara tidak terus-menerus berada dalam pasar kerja (bekerja dan mencari pekerjaan)
- b. Angkatan kerja primer, yaitu mereka yang secara terus menerus berada dalam pasar kerja (bekerja dan mencari pekerjaan).

#### 2.1.5 Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi disuatu daerah pada periode tertentu (Mankiw:2012). Pada PDRB digunakan sebagai pengukuran banyak output yang diproduksi dan pengukuran kesejahteraan penduduk suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (2013), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Pada istilah produk domestik regional bruto disebut domestik karena menyangkut batas wilayah dan dinamakan bruto karena telah memasukkan komponen penyusutan dalam perhitungannya. Secara umum PDRB diartikan

sebagai agregat ekonomi, artinya angka besaran total yang menunjukkan prestasi suatu wilayah. Lalu agregat ekonomi tersebut dipakai sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi riil terlebih dahulu harus dihilangkan pengaruh perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi menurut harga berlaku sehingga terbentuk harga agregat ekonomi menurut harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menjelaskan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku disetiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menjelaskan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga barang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar (Noviyani, 2012). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan sebagai cara untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai cara untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

- 1) Pendekatan Produksi

Dengan pendekatan produksi, pendapatan nasional diketahui dengan menjumlahkan nilai produksi barang-barang dan jasa yang diciptakan oleh semua sektor ekonomi, yang dihitung menurut harga faktor-faktor produksi yang digunakan dalam tiap proses produksi selama satu jangka waktu tertentu (Deliarnov 1995:38). Persamaan fungsi produksi pada pendekatan produksi adalah sebagai berikut:

$$Y = y(K, L, t)$$

Keterangan:

Y= Produksi

K= Modal

L= Tenaga Kerja

t= Teknologi

2) Pendekatan Pendapatan

Pengukuran pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi dari aktivitas ekonominya dalam suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Pendapatan tersebut berupa sewa, bunga, upah, keuntungan dan lain sebagainya. Angka yang diperoleh dari perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan ini menunjukkan besarnya Pendapatan Nasional atau National Income (NI).

3) Pendekatan Pengeluaran

Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi agar dapat membeli barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama periode tertentu. Produk nasional atau produk domestik regional bruto dapat dikatakan sebagai hasil penjumlahan nilai pasar dari permintaan diberbagai sektor.

Perhitungan yang digunakan untuk menghitung output pada perekonomian dengan pendekatan pengeluaran dapat dijelaskan pada persamaan berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

(sumber: Karya, 2016:66)

Penggolongan sektor pengeluaran tersebut antara lain, yaitu:

- a. Pengeluaran atau konsumsi rumah tangga (C), merupakan hasil dari semua pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa keperluan rumah tangga.
- b. Pengeluaran perusahaan atau Investasi (I), merupakan pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk membeli barang-barang modal agar dapat membangun perusahaan baru atau memperluas perusahaan yang sudah ada.
- c. Pengeluaran konsumsi pemerintah (G), merupakan total pengeluaran pemerintah yang bersifat konsumsi, contohnya untuk membangun jalan dan jembatan, irigasi, listrik, air minum, dan lain sebagainya.
- d. Ekspor bersih (X-M), merupakan selisih antara nilai penjualan barang-barang dan jasa keluar negeri (Ekspor, X) dengan nilai barang-barang dan jasa yang didatangkan dari luar negeri (Impor, M).

#### 2.1.6 Isu Keterkaitan Variabel Indeks Harga Konsumen (IHK), Angkatan Kerja (AK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP)

- a. Pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP).

Tujuan penggunaan Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah mengukur perubahan biaya hidup, dengan kata lain IHK membantu mengukur beberapa pendapatan yang harus bertambah agar dapat mempertahankan standar hidup.

Menurut Barsales (2014) Indeks Harga Konsumen (IHK) sangat berpengaruh dalam penetapan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP), karena saat biaya kebutuhan masyarakat meningkat, maka tingkat upah juga selanjutnya meningkat.

- b. Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja (AK) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP).

Menurut Simanjuntak (dalam Febrika 2016:33) Jumlah angkatan kerja dipakai agar dapat mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja. Maka dari itu, dengan mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja, akan dapat disesuaikan tingkat upah yang layak bagi para pekerja karena upah dapat dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja. Maka, jumlah angkatan kerja sangat berpengaruh terhadap upah minimum provinsi. Karena jika jumlah angkatan kerja meningkat dengan jumlah lapangan kerja yang sangat terbatas akan dapat menurunkan tingkat penawaran tenaga kerja sehingga akan menaikkan tingkat upah, dan sebaliknya jika jumlah angkatan kerja menurun akan menaikkan tingkat penawaran tenaga kerja, kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan diserap oleh sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat upah.

- c. Pengaruh Produk Domesik Regional Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dalam penentapan upah minimum provinsi, pemerintah dan dewan pengupahan menggunakan faktor laju PDRB (Barsales, 2014). Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan output PDRB, maka upah minimum akan ditingkatkan. Peningkatan output PDRB merupakan suatu pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Maka dari itu, Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) karena jika nilai Produk Domestik Regional Bruto meningkat, maka Tingkat Upah Minimum juga akan meningkat.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang hampir sama, diantaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Ringkasan
1	Miswar, 2018	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah pekerja di Aceh	Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi jumlah upah pekerja adalah pendidikan, jenis pekerjaan, jam kerja, dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap jumlah upah pekerja.
2	Febrika Nurtiyas, 2016	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2014	Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa variabel indeks harga konsumen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap upah minimum provinsi, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap upah minimum provinsi, dan variabel PDRB memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap upah minimum provinsi.
3	Armidi, Erfit, dan Yulmardi,	Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks	Secara simultan tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks harga konsumen

No	Nama/ Tahun	Judul	Ringkasan
	2018	harga konsumen terhadap upah minimum Provinsi Jambi	memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap upah minimum provinsi. Secara Parsial tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap upah minimum Provinsi Jambi, sedangkan indeks harga konsumen berpengaruh signifikan dan negati terhadap Upah Minimum Provinsi.

### 2.3. Hipotesis

Berdasarkan pada masalah pokok yang telah dikemukakan, maka penulis mencoba untuk mengemukakan hipotesis bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK), Angkatan Kerja (AK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Indonesia meliputi semua provinsi yang ada di Indonesia.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, maka dalam penelitian ini tidak terdapat populasi dan sampel penelitian.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dimana metode penelitian adalah pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Pendekatan metode diangkat dari data, lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk data panel yaitu terdiri dari 34 provinsi dan dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2009-2018. Data bersumber dari instansi yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), data yang diperoleh adalah data Upah Minimum Provinsi tiap provinsi di Indonesia, Indeks Harga Konsumen tiap provinsi di Indonesia, Angkatan Kerja tiap provinsi di Indonesia, dan Produk Domestik Regional tiap provinsi di Indonesia.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Metode kepustakaan (library research), merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai buku literatur yang berhubungan dengan pembahasan ini.
2. Teknik dokumentasi merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Data yang diambil adalah data berdasarkan provinsi diantaranya yaitu: indeks harga konsumen, angkatan kerja, produk domestik regional bruto, dan upah minimum provinsi.

### 3.5 Definisi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu antara lain:

#### 1) Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah minimum provinsi adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur.

#### 2) Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu:

##### a) Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks harga konsumen adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Angka IHK diperoleh dengan menghitung

harga barang-barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam suatu periode tertentu.

b) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang sedang bekerja, seseorang yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja.

c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi disuatu daerah pada periode tertentu (Mankiw:2012). Pada PDRB digunakan sebagai pengukuran banyaknya output yang diproduksi dan pengukuran kesejahteraan penduduk disuatu daerah.

### 3.6 Metode Analisis Data

Estimasi model regresi dengan data panel dan dapat dibagi menjadi 3 metode yang dapat digunakan dalam menganalisis data tersebut, antara lain:

1. Common Effect Model (CEM)
2. Fixed Effect Model (FEM)
3. Random Effect Model (REM)

Dari ketiga model estimasi diatas, dapat ditentukan model terbaik yang akan digunakan untuk mengolah data penelitian, dan dapat dilakukan dengan melakukan beberapa uji, yaitu Uji Chow dan Uji Hausmann.

Metode analisis data yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini, menggunakan *software eviews 9.0* dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas (indeks harga konsumen, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto) terhadap variabel terikat (upah minimum provinsi). Untuk mengetahui pengaruh variabel faktor indeks harga konsumen ( $X_1$ ), angkatan kerja ( $X_2$ ), dan produk domestik regional bruto ( $X_3$ ) yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum provinsi di Indonesia digunakan persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 \text{Log } X_2 + \beta_3 \text{Log } X_3 + E_i$$

Keterangan:

$Y$  = Tingkat Upah Minimum Provinsi 10 tahun

$X_1$  = Indeks Harga Konsumen 10 tahun (%)

$X_2$  = Angkatan Kerja 10 tahun (Jiwa)

$X_3$  = Produk Domesik Regional Bruto 10 tahun (Juta Rupiah)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Parameter

Log =Logaritma

$E_i$  = Error term

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis regresi data panel dengan bantuan *Software Eviews 9.0*, maka digunakan uji statistik diantaranya:

### 1. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan pengaruh dari variabel bebas (indeks harga konsumen, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto) terhadap variabel terikat (upah minimum provinsi). Semakin besar  $R^2$ , maka semakin kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

### 2. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam metode mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (Indeks Harga Konsumen, Angkatan Kerja, dan Produk Domestik Regional Bruto) secara signifikan terhadap variabel terikat (Upah Minimum Provinsi).

- a) Jika  $F_{\text{prob.}} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b)  $F_{\text{Prob.}} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

### 3. Uji t

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas (Indeks harga konsumen, Angkatan kerjadan Produk

domestik regional Bruto) dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (Upah minimum provinsi) secara nyata. Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variabel bebas. Dengan tingkat signifikansi yang digunakan untuk pengaruh variabel bebas (indeks harga konsumen, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto) terhadap variabel terikat (upah minimum provinsi). Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a) Jika Prob.  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika Prob.  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya masing-masing variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dengan menggunakan empat jenis pengujian yaitu sebagai berikut:

##### a. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah data yang bersifat normal. Metode yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain Jarque-Bera Test (J-B Test). Dalam metode ini, yang dilakukan adalah menghitung nilai skewness dan kurtosis. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas yaitu  $H_0$ : data terdistribusi normal dan  $H_a$ : data tidak terdistribusi normal. Untuk melihat data terdistribusi normal atau tidak yaitu:

a) Jika nilai Jarque-Bera  $< X^2$  tabel, maka  $H_0$  diterima (data terdistribusi normal).

b) Jika nilai Jarque-Bera  $> X^2$  tabel, maka  $H_0$  ditolak (data tidak terdistribusi normal).

Selain itu, jika nilai probabilitas  $> \alpha$  (0,05) maka data terdistribusi normal dan sebaliknya jika probabilitas  $< \alpha$  (0,05) maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana terjadinya satu atau lebih variabel bebas yang berkorelasi sempurna dan mendekati sempurna dengan variabel bebas lainnya. Sebagai aturan main yang kasar (rule of thumb), jika koefisien korelasi cukup tinggi katakanlah diatas 0,85 maka diduga ada multikolinieritas dalam model, dan sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka diduga model tidak mengandung unsur multikolinieritas (Widarjono 2018: 104).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu pengamatan kepengamatan lain yang berbeda. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut terjadi heteroskastisitas atau tidak dapat dilihat dari nilai nilai probability pada masing-masing variabel independen. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Probabilitas  $> \alpha 0.05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Probabilitas  $< \alpha 0.05$  maka terjadi heteroskedastisitas

- d. Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Pengujian ini mempunyai arti bahwa hasil satu tahun tertentu dipengaruhi tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson. Pengujian autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar waktu. Metode yang digunakan sebagai berikut:

- a) Jika  $DW < DL$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi positif.
- b) Jika  $DW > DL-4$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi negatif.
- c) Jika  $DU < DW < 4-DU$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.
- d) Jika  $DW$  terlatak diantara  $DL$  dan  $DU$  atau diantara  $(4-DU)$  dan  $(DL-4)$  maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (ragu-ragu).

Nilai  $DU$  dan  $DL$  dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson yang bergantung dengan banyaknya variabel independen.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Sejarah Singkat Negara Republik Indonesia

Kata “Indonesia” berasal dari bahasa Yunani yaitu *Indus* yang mengarah pada sungai Indus di India dan *nesos* yang artinya adalah pulau. Maka, kata Indonesia memiliki arti kepulauan yang berada di wilayah Hindia atau wilayah “Kepulauan India”. Hal ini menerangkan kepada persamaan di antara dua bangsa yaitu India dan Indonesia. Pada tahun 1850, seorang etnolog berkebangsaan Inggris yaitu George Windors Earl mengusulkan istilah *Indonesia* dan *Malayunesia* untuk penduduk “Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu” murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata *Indonesia* sebagai sinonim dari *Kepulauan India*.

Akan tetapi penulisan akademik di media Hindia Belanda tidak memakai kata *Indonesia* melainkan memakai istilah *Kepulauan Melayu* (*Maleische Archipel*); *Hindia Timur Belanda* (*Nederlandsch Oost Indië*), atau *Hindia* (*indië*); *Timur* (*de Oost*); dan bahkan pada tahun 1860 istilah *Insulinde* (diperkenalkan dalam novel milik *Max Havelaar* (1859) yang ditulis oleh Multatuli mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).

Pada tahun 1900, nama Indonesia mulai digunakan oleh golongan nasionalis Indonesia untuk ekspresi politik, dan nama tersebut menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda. Melalui buku *Indonesian oder die inseln des Malayischen Archipels* (1884-1894), Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama Indonesia. Pelajar Indonesia yang pertama

menggunakannya adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewanara), yang mana ketika ia mendirikan kantor berita yang bernama *Indonesisch Pers Bureau* pada tahun 1913 di Belanda.

Kepulauan Indonesia diduga mulai dihuni sekitar dua juta sampai 500.000 tahun yang lalu oleh Antropolog yang juga dijuluki “Manusia Jawa” dengan pembuktian adanya peninggalan fosil-fosil *Homo erectus*. Kedatangan bangsa Austronesia dari daratan Taiwan yang mulai tiba di Nusantara sekitar tahun 2000 SM, yang membentuk mayoritas penduduk pada saat ini dan menyebabkan bangsa Malanesia yang telah ada lebih dahulu disana terdesak kewilayah-wilayah yang jauh di timur kepulauan.

Indonesia adalah lokasi yang tepat bagi pertanian dan juga menguasai cara bercocok tanam padi setidaknya sejak abad ke-8 SM. Hal tersebut menjadikan perkampungan, kota, dan kerajaan-kerajaan kecil tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, Indonesia juga terletak dijalur perdagangan laut Internasional antar pulau, dan telah menjadi jalur perdagangan antara Tiongkok dan India selama berabad-abad. Sejak saat itu, Indonesia mengalami banyak pengaruh dari kegiatan perdagangan tersebut.

Pada abad ke-4 sampai abad ke-14, dibawah pengaruh agama Hindu dan Budha beberapa kerajaan terbentuk di pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Seperti kerajaan Kutai yang merupakan Kerajaan tertua di Nusantara yang telah berdiri sejak abad ke-4 di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di abad ke-4 sampai abad ke-7 diwilayah barat Pulau Jawa berdiri pula kerajaan tarumanegara.

Pemerintahan Tarumanegara dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda mulai tahun 669 SM sampai 1579 M.

Pada abad ke-7 Sriwijaya mengalahkan Melayu dan muncul sebagai kerajaan maritim yang paling perkasa di Nusantara . Adapun wilayah kekuasaannya yang meliputi Sumatera, Jawa, Semenanjung Melayu, serta mengatur perdagangan di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Tiongkok Selatan. Sekitar abad ke-8 dan ke-10, dibawah pengaruh Sriwijaya bangsa Syailendra dan Sanjaya berhasil mengembangkan kerajaan-kerajaan berbasis agrikultur di Jawa, dengan peninggalan bersejarahnya yaitu Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Diakhir abad ke-13, Kerajaan Majapahit berdiri di bagian timur pulau Jawa. Dalam sejarah Indonesia, pimpinan Majapahit Gajah Mada meluas sampai hampir meliputi wilayah Indonesia dan sering disebut ”Zaman Keemasan”.

Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dimulai dengan kedatangan pedagang-pedagang dari Arab dan Persia melalui India, Gujarat, yang kemudian membawa agama Islam. Begitu juga dengan para pelaut Tiongkok dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam, yang pada abad ke-15 juga menyinggahi dan menyebarkan agama Islam di beberapa wilayah Nusantara.

Pada abad ke-16, orang-orang Eropa datang ke Indonesia dan menguasai beberapa kerajaan dan mendominasi rempah-rempah. Orang Portugis juga merupakan orang yang pertama kali mendarat di dua pelabuhan Kerajaan Sunda yaitu Banten dan Sunda Kelapa, tetapi mereka berhasil diusir dan bergerak kearah timur dan akhirnya menguasai Maluku.

Pada abad ke-17, agama Kristen masuk ke Indonesia sebagai salah satu misi imperialisme lama yang disebut 3G, yaitu *Gold, Glory*, dan *Gospel*, yang ditandai dengan munculnya Negara Belanda yang merupakan negara terkuat diantara negara-negara Eropa lainnya. Indonesia dikuasai oleh Belanda sebagai koloni hingga Perang Dunia II, yang awalnya melalui VOC dan kemudian langsung oleh pemerintah Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial yang lebih bebas setelah tahun 1870, sistem *Culturstelsel* (sistem penanaman) atau perkebunan besar dan penanaman paksa yang dilaksanakan di Pulau Jawa dihapus. Setelah tahun 1901, pihak Belanda mengeluarkan kebijakan beretika, yang termasuk investasi yang lebih besar dan reformasi politik yang terbatas di Hindia Belanda.

Saat Belanda dijajah oleh Jerman di masa Perang Dunia II, Jepang melihat pejuang Indonesia pantas menjadi rekan perdagangan yang kooperatif. Pada tahun 1943, Kaisar Jepang memberikan penghargaan kepada Soekarno, Moh. Hatta, KH. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, dibawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang tepatnya setelah berakhirnya perang pasifik tahun 1945. Setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tiga pendiri bangsa yaitu Soekarno menjabat sebagai presiden, Moh. Hatta sebagai wakil presiden, dan Sutan Sjahrir menjabat sebagai perdana menteri.

Tanggal 27 Desember 1949, setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional, terutama Amerika Serikat, akhirnya Belanda menerima

hak Indonesia untuk merdeka sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Integral Natsir menyerukan kembalinya negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membubarkan Republik Indonesia Serikat.

Pada sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an, awal pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno dimulai dengan mengikuti dan merintis gerakan non-blok, lalu menjadi gerakan blok sosialis seperti Republik Rakyat Tiongkok dan Yugoslavia. Tahun 1960-an terjadi konfrontasi militer terhadap negara tetangga yaitu Malaysia, dan ketidakpuasan terhadap meningkatnya kesulitan perekonomian.

Kemudian pada tahun 1965, meledak kejadian G30S yang menyebabkan 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah meninggal dunia. Saat itu pula muncul suatu kekuatan baru atau disebut dengan orde baru yang menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai pelaku dibelakang kejadian ini dan bermaksud menggulingka pemerintahan dan mengganti ideologi nasional berdasarkan paham sosialis-komunis, dan menjadikan alasan tersebut untuk menggantikan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Pada tahun 1967 ketika kondisi fisik Soekarno menurun, Jenderal Soeharto menggantikan posisi Soekarno sebagai presiden Indonesia dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Setelah itu, dibawah pimpinan Soeharto, ratusan ribu warga Indonesia dicurigai telah terlibat dengan pihak komunis dan yang akhirnya dibunuh, sementara sebagian warga Indonesia yang berada di luar negeri tidak berani kembali ke Indonesia dan akhirnya dicabut

kewarganegaraannya. Soeharto menjabat selama 32 tahun dan masa pemerintahannya disebut dengan masa Orde Baru, sedangkan saat pimpinan Soekarno disebut dengan masa Orde Lama.

Dimasa pimpinan Soeharto, ia berhasil menerapkan ekonomi neoliberal dan mendatangkan investasi yang besar dari luar negeri ke Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg tinggi walaupun tidak merata. Pada awal permulaan masa Orde Baru, kebijakan ekonomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan dari Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley atau disebut sebagai “Mafia Berkeley”. Akan tetapi, pada tahun 1998 terjadi demo besar-besaran dan perekonomian Negara Indonesia memburuk yang akhirnya Soeharto diturunkan dari jabatannya karena menguntungkan keluarganya dengan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada tahun 1998 sampai 2001, terjadi masa peralihan *Orde Reformasi* atau *Era Reformasi* terdapat tiga masa presiden, yaitu: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Lalu ditahun 2004, diadakannya Pemilihan Umum dan dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden yang terpilih secara langsung mulai tahun 2004-2009. Lalu pada tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi presiden dan Budiono sebagai wakil presiden mulai tahun 2009-2014.

Saat ini Indonesia sedang dilanda masalah perekonomian, politik, dan pertengkarannya yg bernuansa agama, dan beberapa daerah juga berusaha keluar dari naungan NKRI salah satunya yaitu Papua. Pada tahun 1999 Timor-Timor secara

resmi memisahkan diri dari NKRI setelah bergabung selam 24 tahun dan 3 tahun berada diadministrasi PBB menjadi negara Timor Leste.

#### 4.2. Letak Geografis dan Luas Wilayah Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia berada diposisi antara 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan dan antara 95° Bujur Timur – 141° Bujur Timur. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang snagat unik dan strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak geografisnya yang terbentang sepanjang 3.977 mil diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570  $km^2$  dan luas perairanya 3.257.483  $km^2$ .

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6000 diantaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Indonesia terdiri dari 34 provinsi, dimana provinsi tersebut dibagi menjadi 416 kabupaten dan 98 Kota. Negara ini menempati posisi ke empat jumlah penduduk terbesar didunia. Dimana jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 sebanyak 269 juta jiwa. Pulau terpadat penduduknya dalah pulau Jawa, dimana setengah populasi Indonesia bermukim.

Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107  $km^2$ , Sulawesi dengan luas 189.216  $km^2$ , papua dengan luas 421.981  $km^2$ , Sumatera dengan luas 473.606  $km^2$ , dan Kalimantan dengan luas 539.460  $km^2$ . Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan teritorial laut: 12

mil laut serta zona ekonomi eksklusif 200 mil laut, searah penjuruan mata angin, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Negara Malaysia dengan panjang perbatasan yaitu 1.782 km, Singapura, Filipina, dan laut Tiongkok Selatan.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dengan panjang perbatasan yaitu 820 km, Timor Leste, dan Samudra Pasifik.

Pembagian waktu di Indonesia ditetapkan berdasarkan standar waktu internasional yang dihitung berdasarkan garis lintang bumi yang dimulai di Kota Greenwich Inggris yang berperan sebagai pusat 0 (nol) derajat, dan antara zona waktu yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan waktu 1 jam. Di Indonesia pembagian waktunya dibagi menjadi tiga zona waktu yaitu: (1) Waktu Indonesia Barat (WIB) yang meliputi Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan, (2) Waktu Indonesia Tengah (WITA) yang meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sebagian Provinsi di Kalimantan, (3) Waktu Indonesia bagian Timur (WIT) yang meliputi Pulau Maluku serta seluruh Irian.

Tabel 4.1. Luas Provinsi di Indonesia Tahun 2018

No	Provinsi	Ibukota Provinsi	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Indonesia (%)
1	Aceh	Banda Aceh	57.956,00	3,02
2	Sumatera Utara	Medan	72.981,23	3,81
3	Sumatera Barat	Padang	42.012,89	2,19
4	Riau	Pekanbaru	87.023,66	4,54
5	Jambi	Jambi	50.058,16	2,61
6	Sumatera Selatan	Palembang	91.592,43	4,78

No	Provinsi	Ibukota Provinsi	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Indonesia (%)
7	Bengkulu	Bengkulu	19.919,33	1,04
8	Lampung	Bandar Lampung	34.623,80	1,81
9	KEP. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16.424,06	0,86
10	KEP. Riau	Tanjung Pinang	8.201,72	0,43
11	DKI Jakarta	Jakarta	664,01	0,03
12	Jawa Barat	Bandung	35.377,76	1,85
13	Jawa Tengah	Semarang	32.800,69	1,71
14	DI Yogyakarta	Yogyakarta	3.133,15	0,16
15	Jawa Timur	Surabaya	47.799,75	2,49
16	Banten	Serang	9.662,92	0,50
17	Bali	Denpasar	5.780,06	0,30
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	18.572,32	0,97
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	48.718,10	2,54
20	Kalimantan Barat	Pontianak	147.307,00	7,68
21	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	153.564,50	8,01
22	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	38.744,23	2,02
23	Kalimantan Timur	Samarinda	129.066,64	6,74
24	Kalimantan Utara	Bulungan	75.467,70	3,94
25	Sulawesi Utara	Manado	13.851,64	0,72
26	Sulawesi Tengah	Palu	61.841,29	3,23
27	Sulawesi Selatan	Makassar	46.717,48	2,44
28	Sulawesi Tenggara	Kendari	38.067,70	1,99
29	Gorontalo	Gorontalo	11.257,07	0,59
30	Sulawesi Barat	Mamuju	16.787,18	0,88
31	Maluku	Ambon	46.914,03	2,45
32	Maluku Utara	Ternate	31.982,50	1,66
33	Papua Barat	Manokwari	112.955,15	5,37
34	Papua	Jayapura	319.036,05	16,64
INDONESIA			1.916.862,2	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa luas provinsi di Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 1.916.862,2 km<sup>2</sup> atau 100%. Adapun provinsi yang luas wilayahnya terbesar adalah Provinsi Papua yaitu seluas 319.036,05 km<sup>2</sup> atau 16,64%, sedangkan provinsi yang luas wilayahnya terkecil adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu seluas 664,01 km<sup>2</sup> atau 0,03%.

#### 4.3 Wilayah Administrasi Pemerintah Indonesia

Berdasarkan UUD 1945 pasal 25 “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam UU No. 43 tahun 2008 tentang wilayah negara yang mengatur tentang kedaulatan, kwilayahan, dan manajemen perbatasan termasuk juga didalamnya yaitu wewenang pemerintah daerah.

Indonesia terdiri dari 34 provinsi masing-masingnya memiliki pemerintah daerah sendiri yang dipimpin oleh seorang gubernur, dan tiap-tiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi. Pemilihan Gubernur dan anggota DPRD dilakukan dengan diadakannya Pemilihan Umum untuk masa jabatan lima tahun. Saat ini lima diantara provinsi yg ada di Indonesia memiliki status yang istimewa legislatur dan tingkat otonomi yang berbeda, diantaranya yaitu: Jakarta tidak memiliki DPR kabupaten/ kota, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua. Kabupaten/ kota memiliki tingkat yang sama da juga memiliki pemerintah daerah dan lembaga legislatif masing-masing. Setiap Kkabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan DPRD kabupaten, sedangkan kota dipimpin oleh walikota dengan DPRD kota.

#### 4.4 Perkembangan Penduduk Indonesia

Penduduk merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan pembangunan yang lebih luas, dimana penduduk merupakan subjek dan objek dari sebuah pembangunan. Hal tersebut disebabkan

karena pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan juga ditujukan untuk kesejahteraan penduduk. Peranan penduduk sebagai subjek pembangunan menunjukkan kapasitas sumber daya manusia sebagai unsur pencipta, pemakai, dan sebagai pengembang teknologi.

Di Indonesia, masalah penduduk saat ini adalah peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Hal tersebut menyebabkan sulitnya menciptakan manusia yang berkualitas. Adapun program kependudukan yang dilakukan diantaranya dengan pengendalian kelahiran, perpanjangan usia dan harapan hidup, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak, serta meningkatkan pengembangan potensi penduduk. Pesatnya pertumbuhan penduduk juga menyebabkan penyebaran yang tidak merata. Dalam persebaran penduduk faktor yang mempengaruhinya tidak hanya luas wilayah dan skala kegiatan pembangunan saja, melainkan skala kegiatan pemerintah juga menjadi faktor terhadap persebaran penduduk. Berikut ini adalah data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2005-2015.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2018

NO	PROVINSI	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2018 (%)
		2010	2012	2018	
1	Aceh	4.494,40	4.523,10	5.281,30	1,96
2	Sumatera Utara	12.982,20	13.028,70	14.415,40	1,27
3	Sumatera Barat	4.846,90	4.865,30	5.382,10	1,27
4	Riau	5.538,40	5.574,90	6.814,90	2,54
5	Jambi	3.092,30	3.107,60	3.570,30	1,75
6	Sumatera Selatan	7.450,40	7.481,60	8.370,30	1,41
7	Bengkulu	1.715,50	1.722,10	1.963,30	1,65
8	Lampung	7.608,40	7.634,00	8.370,50	1,16
9	KEP.BangkaBelitung	1.223,30	1.230,20	1.459,90	2,16
10	KEP. Riau	1.679,20	1.692,80	2.136,50	2,95
11	DKI Jakarta	9.607,80	9.640,40	10.467,60	1,03
12	Jawa Barat	43.053,70	43.227,10	48.683,70	1,50

NO	PROVINSI	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2018 (%)
		2010	2012	2018	
13	Jawa Tengah	32.382,70	32.443,90	34.490,80	0,77
14	DI Yogyakarta	3.457,50	3.467,50	3.802,90	1,16
15	Jawa Timur	37.476,80	37.565,80	39.500,90	0,63
16	Banten	10.632,20	10.688,60	12.689,70	2,17
17	Bali	3.890,80	3.907,40	4.292,20	1,18
18	Nusa Tenggara Barat	4.500,20	4.516,10	5.013,70	1,32
19	Nusa Tenggara Timur	4.683,80	4.706,20	5.371,50	1,67
20	Kalimantan Barat	4.396,00	4.411,40	5.001,70	1,58
21	Kalimantan Tengah	2.212,10	2.220,80	2.660,20	2,28
22	Kalimantan Selatan	3.626,60	3.642,60	4.182,70	1,74
23	Kalimantan Timur	3.553,10	3.047,50	4.365,20	2,52
24	Kalimantan Utara	-	528,60	716,40	3,87
25	Sulawesi Utara	2.270,60	2.277,70	2.484,40	1,09
26	Sulawesi Tengah	2.635,00	2.646,00	3.010,40	1,63
27	Sulawesi Selatan	8.034,80	8.060,40	8.772,00	1,06
28	Sulawesi Tenggara	2.232,60	2.243,60	2.653,70	2,12
29	Gorontalo	1.040,20	1.044,80	1.185,50	1,59
30	Sulawesi Barat	1.158,60	1.164,60	1.355,60	1,92
31	Maluku	1.533,50	1.541,90	1.773,80	1,77
32	Maluku Utara	1.038,10	1.043,30	1.232,60	2,11
33	Papua Barat	760,40	765,30	937,50	2,57
34	Papua	2.833,40	2.857,00	3.322,50	1,90
INDONESIA		237.641,30	238.518,80	265.015,30	1,33

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010-2018 adalah sebesar 1,33%. Adapun Provinsi yang laju pertumbuhan penduduknya tertinggi tahun 2010-2018 adalah Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 3,87%, sedangkan provinsi yang laju pertumbuhan penduduknya terendah adalah Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,63%.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Uraian Variabel Penelitian

##### 5.1.1 Indeks harga Konsumen (IHK)

Indeks harga konsumen adalah salah satu faktor penting dalam penetapan nilai upah minimum karena IHK merupakan ukuran perubahan-perubahan pada biaya hidup. Jika biaya hidup pekerja dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja tersebut akan tercapai. Kebijakan penentuan UMP perlu menggunakan faktor biaya hidup pekerja dalam hal ini indeks harga konsumen untuk mensejahterakan para pekerja. Berikut IHK berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2009-2018:

Tabel 5.1 Indeks Harga Konsumen Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2009-2018 (%)

No	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	117,58	123,03	127,12	127,19	135,32
2	Sumatera Utara	116,82	125,76	130,21	135,15	148,79
3	Sumatera Barat	118,41	127,69	134,55	140,15	155,39
4	Riau	115,04	123,09	129,35	133,68	145,49
5	Jambi	117,54	123,40	133,49	139,12	151,28
6	Sumatera Selatan	118,07	125,18	129,91	133,44	142,84
7	Bengkulu	120,00	125,50	136,08	142,35	156,50
8	Lampung	123,24	128,49	138,63	147,31	158,44
9	KEP. Bangka Belitung	121,65	133,04	141,24	148,87	161,83
10	KEP. Riau	118,39	125,69	129,86	134,95	148,56
11	DKI Jakarta	115,73	119,23	127,80	133,58	144,27
12	Jawa Barat	115,08	120,29	123,60	128,57	138,82
13	Jawa Tengah	116,25	124,51	128,08	134,29	145,29
14	DI Yogyakarta	116,64	125,25	130,11	135,72	145,65
15	Jawa Timur	115,09	123,53	129,36	135,04	145,19
16	Banten	122,29	129,85	133,46	139,34	152,11
17	Bali	116,33	125,75	130,46	136,60	146,64
18	Nusa Tenggara Barat	119,51	132,74	141,21	147,00	160,63
19	Nusa Tenggara Timur	120,62	132,64	138,37	145,43	158,28
20	Kalimantan Barat	120,54	130,81	137,23	146,31	160,18
21	Kalimantan Tengah	117,80	128,98	135,79	144,93	154,28
22	Kalimantan Selatan	119,40	130,22	135,40	143,47	153,49
23	Kalimantan Timur	121,60	130,11	138,22	144,87	159,89
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-

No	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013
25	Sulawesi Utara	117,87	125,27	126,11	133,73	144,59
26	Sulawesi Tengah	120,96	128,70	134,45	142,34	153,12
27	Sulawesi Selatan	117,41	125,42	129,02	134,91	143,33
28	Sulawesi Tenggara	122,85	127,61	134,11	141,15	149,50
29	Gorontalo	118,32	127,11	132,30	139,32	147,46
30	Sulawesi Barat	119,41	127,59	133,85	138,24	146,41
31	Maluku	117,87	128,22	131,87	140,74	153,14
32	Maluku Utara	120,38	126,78	132,51	136,87	150,25
33	Papua Barat	132,93	138,10	143,12	150,10	157,05
34	Papua	117,53	122,80	126,97	132,71	143,68

## Lanjutan

No	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	114,84	116,30	119,94	125,77	128,20
2	Sumatera Utara	120,69	124,70	132,93	137,16	138,53
3	Sumatera Barat	126,03	127,10	133,48	136,30	139,77
4	Riau	119,56	122,80	127,95	133,16	136,54
5	Jambi	120,04	121,69	127,21	130,62	134,57
6	Sumatera Selatan	116,96	120,53	124,96	128,52	132,09
7	Bengkulu	124,55	128,60	135,03	139,84	143,13
8	Lampung	118,40	123,90	127,31	131,31	135,15
9	KEP. Bangka Belitung	118,26	123,77	133,40	136,95	141,67
10	KEP. Riau	119,33	122,27	126,01	130,26	133,34
11	DKI Jakarta	119,41	123,35	126,27	130,97	133,25
12	Jawa Barat	117,11	121,71	125,28	129,61	134,48
13	Jawa Tengah	118,73	121,77	124,59	129,13	132,70
14	DI Yogyakarta	116,84	120,45	123,21	128,39	131,81
15	Jawa Timur	117,81	121,85	125,77	131,26	135,24
16	Banten	123,07	128,82	133,02	139,90	145,19
17	Bali	116,44	119,58	123,10	127,17	131,50
18	Nusa Tenggara Barat	117,47	121,29	124,29	128,75	132,81
19	Nusa Tenggara Timur	120,06	126,15	129,07	131,71	135,96
20	Kalimantan Barat	122,22	129,76	134,80	140,00	145,58
21	Kalimantan Tengah	116,16	121,04	123,35	127,19	131,87
22	Kalimantan Selatan	115,97	121,80	126,28	131,11	134,56
23	Kalimantan Timur	120,19	125,29	128,83	133,58	138,02
24	Kalimantan Utara	-	130,96	136,60	140,38	147,40
25	Sulawesi Utara	118,61	125,20	125,64	128,71	133,64
26	Sulawesi Tengah	120,21	125,22	127,09	132,59	141,15
27	Sulawesi Selatan	116,50	122,54	126,44	132,10	136,70
28	Sulawesi Tenggara	116,16	118,06	121,68	125,28	128,48
29	Gorontalo	115,26	120,22	121,78	127,07	129,80
30	Sulawesi Barat	116,85	122,78	125,52	130,28	132,62
31	Maluku	115,04	121,85	125,85	125,79	130,23
32	Maluku Utara	122,30	127,83	130,27	132,84	138,31
33	Papua Barat	112,58	115,70	122,35	124,53	132,03
34	Papua	120,20	123,55	128,65	131,75	140,58

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa IHK tiap-tiap provinsi memiliki nilai yang berbeda. Pada tahun 2009 provinsi dengan IHK tertinggi adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 132,93%, sedangkan provinsi dengan IHK terendah adalah Provinsi Riau yaitu sebesar 115,05%. Pada tahun 2018 provinsi dengan IHK tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 147,4%, sedangkan provinsi dengan IHK terendah adalah Provinsi Aceh yaitu sebesar 128,20%.

#### 5.1.2 Variabel Angkatan Kerja

Angkatan kerja dalam suatu sektor perekonomian digambarkan sebagai penawaran tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja. Angkatan kerja akan mempengaruhi nilai upah minimum karena nilai upah akan cenderung menurun bila tingkat penawaran tenaga kerja tinggi. Angkatan kerja dibedakan menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan penganggur. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu sedang tidak bekerja. Adapun yang dimaksud dengan penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau berusaha mencari kerja dan belum bekerja minimal satu jam selama seminggu yang lalu sebelum dilakukan pencacahan. Adapun jumlah angkatan kerja berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2009-2018, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.2 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018 (jiwa)

NO	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	1.897.922	1.938.519	1.967.412	1.988.483	2.050.076
2	Sumatera Utara	6.298.070	6.617.377	6.026.020	6.274.874	6.500.750
3	Sumatera Barat	2.172.002	2.194.040	2.230.622	2.234.007	2.216.687
4	Riau	2.260.862	2.377.494	2.461.112	2.509.501	2.623.310
5	Jambi	1.334.496	1.545.683	1.461.213	1.484.033	1.467.007
6	Sumatera Selatan	3.460.365	3.665.044	3.658.951	3.796.829	3.704.132
7	Bengkulu	829.449	855.026	867.699	885.815	872.233
8	Lampung	3.627.155	3.957.697	3.598.090	3.709.599	3.681.084
9	KEP.BangkaBelitung	539.410	620.063	577.539	606.298	620.270
10	KEP. Riau	681.769	826.535	806.711	844.409	854.150
11	DKI Jakarta	4.687.727	5.272.604	5.128.104	5.339.994	5.108.943
12	Jawa Barat	18.981.260	18.893.835	19.334.053	20.474.894	20.620.610
13	Jawa Tengah	17.087.649	16.856.330	17.026.107	17.513.488	17.524.022
14	DI Yogyakarta	2.016.694	1.882.296	1.924.318	1.983.542	1.949.243
15	Jawa Timur	20.338.568	19.527.051	19.513.939	20.167.517	20.432.453
16	Banten	4.357.240	5.309.462	5.072.921	5.177.151	5.181.796
17	Bali	2.123.588	2.246.149	2.224.874	2.300.705	2.283.896
18	Nusa Tenggara Barat	2.098.638	2.252.076	2.083.445	2.126.849	2.146.002
19	Nusa Tenggara Timur	2.250.128	2.132.381	2.097.545	2.186.713	2.175.171
20	Kalimantan Barat	2.200.895	2.197.325	2.262.339	2.276.975	2.262.732
21	Kalimantan Tengah	1.047.402	1.066.733	1.118.644	1.148.275	1.158.834
22	Kalimantan Selatan	1.821.717	1.840.296	1.895.277	1.934.310	1.900.350
23	Kalimantan Timur	1.460.996	1.648.455	1.717.703	1.766.900	1.742.380
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	1.051.130	1.036.574	1.060.730	1.057.416	1.035.772
26	Sulawesi Tengah	1.215.727	1.220.454	1.299.834	1.274.460	1.293.332
27	Sulawesi Selatan	3.536.920	3.571.317	3.621.417	3.639.821	3.558.183
28	Sulawesi Tenggara	998.195	1.045.899	1.001.983	1.037.479	1.042.947
29	Gorontalo	447.313	456.499	477.420	476.634	478.813
30	Sulawesi Barat	511.144	532.171	555.775	584.694	558.574
31	Maluku	596.030	651.339	693.932	664.607	668.721
32	Maluku Utara	422.398	437.758	450.539	472.998	472.965
33	Papua Barat	352.385	342.888	355.011	367.493	376.081
34	Papua	1.128.036	1.510.176	1.526.422	1.542.971	1.610.484

## Lanjutan

NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	2.123.312	2.182.824	2.257.943	2.288.777	3.353.440
2	Sumatera Utara	6.272.083	6.391.098	6.362.909	6.743.277	7.124.458
3	Sumatera Barat	2.331.993	2.346.163	2.473.814	2.483.675	2.552.130
4	Riau	2.695.247	2.771.349	2.987.952	2.965.585	3.108.398
5	Jambi	1.570.822	1.620.752	1.692.193	1.724.633	1.790.437
6	Sumatera Selatan	3.885.674	3.934.787	4.178.794	4.123.669	4.138.957
7	Bengkulu	900.054	951.007	997.913	969.255	998.524
8	Lampung	3.857.936	3.832.108	4.121.668	4.072.487	4.232.066
9	KEP.BangkaBelitung	636.959	665.842	705.173	699.017	727.918
10	KEP. Riau	878.415	891.988	931.435	966.091	970.132
11	DKI Jakarta	5.063.479	5.092.219	5.178.839	4.856.116	5.041.620

NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	2018
12	Jawa Barat	21.006.139	20.586.356	21.075.899	22.391.003	22.628.122
13	Jawa Tengah	17.547.026	17.298.925	17.312.466	18.010.612	18.059.895
14	DI Yogyakarta	2.023.461	1.971.463	2.099.436	2.117.187	2.191.742
15	Jawa Timur	20.149.998	20.274.681	19.953.846	20.937.716	21.300.423
16	Banten	5.338.045	5.334.843	5.587.093	5.596.963	5.829.228
17	Bali	2.316.758	2.372.015	2.463.039	2.434.450	2.525.355
18	Nusa Tenggara Barat	2.221.810	2.255.879	2.464.331	2.396.196	2.237.381
19	Nusa Tenggara Timur	2.247.438	2.307.737	2.353.648	2.398.609	2.486.281
20	Kalimantan Barat	2.320.229	2.357.224	2.388.758	2.408.259	2.451.399
21	Kalimantan Tengah	1.193.171	1.272.461	1.311.427	1.276.669	1.355.399
22	Kalimantan Selatan	1.941.229	1.987.250	2.078.384	2.074.117	2.116.944
23	Kalimantan Timur	1.811.129	1.539.491	1.717.892	1.654.964	1.732.598
24	Kalimantan Utara	-	283.102	288.522	330.731	341.197
25	Sulawesi Utara	1.060.752	1.099.272	1.183.721	1.121.309	1.175.809
26	Sulawesi Tengah	1.342.615	1.384.235	1.509.505	1.428.583	1.502.972
27	Sulawesi Selatan	3.715.801	3.706.128	3.881.003	3.812.358	3.988.029
28	Sulawesi Tenggara	1.085.509	1.138.045	1.253.624	1.200.605	1.248.212
29	Gorontalo	500.056	517.788	562.196	547.766	578.880
30	Sulawesi Barat	608.446	616.549	645.671	614.748	639.622
31	Maluku	672.304	727.259	743.149	707.796	755.034
32	Maluku Utara	481.504	513.601	524.526	516.231	541.446
33	Papua Barat	398.424	413.635	434.817	430.478	445.630
34	Papua	1.675.113	1.741.945	1.722.162	1.762.841	1.835.963

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2009 provinsi dengan jumlah angkatan kerja tertinggi yaitu Provinsi Jawa Timur yaitu sejumlah 20.338.568 jiwa, sedangkan provinsi dengan jumlah angkatan kerja paling sedikit yaitu Provinsi Papua Barat yaitu sejumlah 352.385 jiwa. Pada tahun 2018 provinsi dengan jumlah angkatan kerja tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat yaitu sejumlah 22.628.122 jiwa, sedangkan provinsi dengan jumlah angkatan kerja paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara yaitu sejumlah 341.197 jiwa.

### 5.1.3 Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi upah minimum provinsi. PDRB merupakan jumlah nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu diwilayah tertentu.

Jika terjadi peningkatan pada produktivitas tenaga kerja yang diukur dari output PDRB, maka upah minimum akan meningkat. Adapun PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2009-2018, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.3 Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018 (Juta Rupiah)

No	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	32.219.086	101.545.236	104.874.211	108.914.897	111.755.826
2	Sumatera Utara	111.559.225	331.085.240	353.147.590	375.924.139	398.727.142
3	Sumatera Barat	36.683.239	105.017.739	111.679.493	118.724.424	125.940.634
4	Riau	93.786.237	388.578.230	410.215.840	425.625.998	436.187.507
5	Jambi	16.274.908	90.618.410	97.740.870	104.615.082	111.766.131
6	Sumatera Selatan	60.452.945	194.012.970	206.360.700	220.459.198	232.175.047
7	Bengkulu	7.859.920	28.352.570	30.295.050	32.363.037	34.326.371
8	Lampung	36.256.295	150.560.840	160.437.500	170.769.206	180.620.007
9	KEP.BangkaBelitung	10.270.106	35.561.900	38.013.990	40.104.906	42.190.857
10	KEP. Riau	38.318.829	111.223.670	118.961.420	128.034.968	137.263.851
11	DKI Jakarta	371.469.499	1.075.183.480	1.147.555.230	1.222.527.925	1.296.694.574
12	Jawa Barat	303.405.251	906.685.760	965.622.060	1.028.409.740	1.093.543.546
13	Jawa Tengah	176.673.457	623.224.620	656.268.130	691.343.116	726.655.118
14	DI Yogyakarta	20.064.257	64.678.970	68.049.870	71.702.449	75.627.449
15	Jawa Timur	320.861.169	990.648.840	1.054.401.770	1.124.464.640	1.192.789.802
16	Banten	83.453.729	271.465.280	290.545.840	310.385.592	331.099.105
17	Bali	27.290.946	93.749.350	99.991.630	106.951.465	114.103.580
18	Nusa Tenggara Barat	18.874.404	70.122.730	67.379.140	66.340.812	69.766.714
19	Nusa Tenggara Timur	11.920.602	43.846.610	46.334.130	48.863.187	51.505.188
20	Kalimantan Barat	28.756.876	86.065.850	90.797.590	96.161.928	101.980.339
21	Kalimantan Tengah	17.657.792	56.531.020	60.492.930	64.649.165	69.410.986
22	Kalimantan Selatan	29.051.631	85.305.000	91.252.130	96.697.838	101.850.536
23	Kalimantan Timur	105.564.938	418.211.580	445.264.420	469.646.252	482.624.606
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	98.402.074	51.721.330	54.910.900	58.677.586	62.442.498
26	Sulawesi Tengah	17.149.624	51.721.070	56.833.830	62.249.529	68.219.319
27	Sulawesi Selatan	16.207.596	171.741.740	185.708.470	202.184.587	217.589.132
28	Sulawesi Tenggara	47.326.078	48.401.150	53.546.690	59.785.399	64.268.714
29	Gorontalo	10.768.577	15.475.740	16.669.090	17.987.074	19.367.572
30	Sulawesi Barat	2.710.737	17.183.830	19.027.500	20.786.885	22.227.392
31	Maluku	3.993.139	18.428.580	19.597.390	21.000.078	22.100.937
32	Maluku Utara	2.812.039	14.983.910	16.002.450	17.120.069	18.208.743
33	Papua Barat	7.286.977	41.361.670	42.867.190	44.423.335	47.694.235
34	Papua	23.138.444	110.808.180	106.066.720	107.890.942	117.118.818

#### Lanjutan

No	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	113.490.359	112.665.532	116.374.299	121.240.978	126.824.491
2	Sumatera Utara	419.573.308	440.955.852	463.775.464	487.531.231	512.765.628
3	Sumatera Barat	133.340.836	140.719.474	148.134.243	155.984.364	164.033.655

No	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	2018
4	Riau	447.986.782	448.991.963	458.769.340	471.081.714	482.087.215
5	Jambi	119.991.444	125.037.398	130.501.132	136.556.706	142.995.279
6	Sumatera Selatan	243.297.771	254.044.875	266.857.400	281.571.013	298.569.335
7	Bengkulu	36.207.145	38.066.005	40.076.543	42.073.515	44.171.161
8	Lampung	189.794.261	199.536.916	209.793.728	220.625.565	232.214.280
9	KEP.BangkaBelitung	44.159.439	45.962.304	47.848.371	49.986.846	52.212.088
10	KEP. Riau	146.325.234	155.131.351	162.853.039	166.111.355	173.689.134
11	DKI Jakarta	1.373.389.129	1.454.563.847	1.539.916.881	1.635.366.581	1.736.195.620
12	Jawa Barat	1.149.216.057	1.207.232.342	1.275.619.241	1.343.864.432	1.419.689
13	Jawa Tengah	764.959.150	806.765.092	849.099.354	893.750.437	941.283.278
14	DI Yogyakarta	79.536.081	83.474.451	87.685.809	92.302.022	98.026.563
15	Jawa Timur	1.262.684.495	1.331.376.099	1.405.563.511	1.482.299.576	1.563.756.369
16	Banten	349.351.227	368.377.203	387.835.089	410.045.924	433.884.318
17	Bali	121.787.574	129.126.562	137.296.445	144.944.691	154.150.978
18	Nusa Tenggara Barat	73.372.963	89.337.985	94.524.289	94.639.543	90.323.419
19	Nusa Tenggara Timur	54.107.974	56.770.793	59.678.012	62.724.720	65.941.413
20	Kalimantan Barat	107.114.962	112.346.755	118.183.272	124.294.358	130.584.092
21	Kalimantan Tengah	73.724.522	78.890.968	83.900.239	89.541.202	94.595.743
22	Kalimantan Selatan	106.779.397	110.863.116	115.743.572	121.855.755	128.106.382
23	Kalimantan Timur	446.029.048	440.676.356	439.003.832	452.741.908	461.931.785
24	Kalimantan Utara	-	49.315.745	51.064.737	54.534.507	57.825.838
25	Sulawesi Utara	66.360.757	70.425.330	74.764.660	79.485.473.63	84.258.691
26	Sulawesi Tengah	71.677.530	82.787.201	91.014.564	97.474.859	103.617.685
27	Sulawesi Selatan	233.988.050	250.802.993	269.401.313	288.814.171	309.243.627
28	Sulawesi Tenggara	68.291.784	72.993.327	77.745.512	83.001.823	88.328.518
29	Gorontalo	20.775.803	22.068.802	23.507.209	25.090.344	26.722.592
30	Sulawesi Barat	24.195.655	25.964.432	27.524.767	29.347.194	31.176.590
31	Maluku	23.567.734	24.859.196	26.284.228	27.813.961	29.465.362
32	Maluku Utara	19.208.760	20.380.303	21.556.679	23.210.864	25.050.118
33	Papua Barat	50.259.907	52.346.485	54.711.282	56.906.821	60.453.560
34	Papua	121.391.233	130.311.604	142.224.930	148.822.516	159.728.925

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 provinsi dengan PDRB tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 371.469.499 juta rupiah, sedangkan provinsi dengan PDRB paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 2.710.737 juta rupiah. Pada tahun 2018 provinsi dengan PDRB tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 1.736.195.620 juta rupiah, sedangkan provinsi dengan PDRB paling rendah adalah Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 25.050.118 juta rupiah.

#### 5.1.4 Analisis Statistik Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi Di Indonesia

Estimasi model regresi dengan data panel dan dapat dibagi menjadi 3 metode yang dapat digunakan dalam menganalisis data tersebut, antara lain:

1. Common Effect Model (CEM)
2. Fixed Effect Model (FEM)
3. Random Effect Model (REM)

Untuk menentukan model yang akan digunakan dapat dilakukan dengan melakukan beberapa uji, yaitu antara lain:

a. Uji Chow

Mula-mula data panel akan diesmitasi memakai efek spesifikasi *fixed*. Uji yang dilakukan yaitu uji Chow. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan *fixed effect* atau *common effect*. Dari ketiga model estimasi diatas, dapat ditentukan model terbaik yang akan digunakan untuk mengolah data penelitian, dan dapat ditentukan dengan ketentuan, yaitu:

$H_0$ : *Common Effect Model*

$H_a$ : *fixed effect Model*

Jika hasil prob. chi-square  $< \alpha$  0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima maka model yang digunakan adalah fixed effect. Hasil estimasi dengan menggunakan *fixed effect model* yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.4. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.014483	(33,297)	0.0000
Cross-section Chi-square	313.592308	33	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 9

Berdasarkan hasil diatas, diketahui pro. Chi-square sebesar  $0,0000 < \alpha$  0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima maka model yang akan dipakai adalah *fixed effect model*.

b. Correlated Random Effect-Hausmann Test

Uji hausmann dapat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0$ : *Random Effect Model*

$H_a$ : *Fixed Effect Model*.

Jika hasil prob. chi-square  $< \alpha$  0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Efect Model*. Berikut merupakan hasil dari estimasi dengan menggunakan *random effect model*:

Tabel 5.5 Hasil Uji Hausmann

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	278.066386	3	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 9

Hasil prob. chi-square adalah  $0,0000 < \alpha$  0,05 maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa model yang sebaiknya digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan hasil dari uji yang telah dilakukan, maka hasil estimasi berdasarkan *fixed effect model* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Hasil Estimasi Pengaruh Indeks Harga Konsumen, Angkatan Kerja, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Upah Minimum Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018

Dependent Variable: LOGY

Method: Panel Least Squares

Date: 07/18/20 Time: 17:40

Sample: 2009 2018

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (unbalanced) observations: 334

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13.25495	1.039896	-12.74641	0.0000
X1	-0.001235	0.000558	-2.212536	0.0277
LOGX2	2.539602	0.199854	12.70731	0.0000
LOGX3	0.252977	0.033170	7.626743	0.0000

#### Effects Specification

#### Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.749098	Mean dependent var	6.130559
Adjusted R-squared	0.718686	S.D. dependent var	0.172769
S.E. of regression	0.091635	Akaike info criterion	-1.837863
Sum squared resid	2.493892	Schwarz criterion	-1.415670
Log likelihood	343.9231	Hannan-Quinn criter.	-1.669529
F-statistic	24.63138	Durbin-Watson stat	0.945546
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Dari Eviews 9

Dari hasil estimasi diatas maka fungsi persamaan yang digunakan adalah:

$$\text{LogY} = -13,25495 - 0,001235 X1 + 2,539602 \text{ LogX2} + 0,252977 \text{ LogX3} + e$$

Dari hasil persamaan diatas, maka diketahui pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut penjelasannya:

a. Koefisien Regresi

Berikut merupakan hasil persamaan indeks harga konsumen, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018 dengan analisis regresi yaitu:

1. Konstanta  $b_0$  sebesar -13.25495 yang artinya jika indeks harga konsumen, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto sama dengan 0 maka besarnya upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018 adalah 13,25495%
2. Nilai koefisien  $b_1$  sebesar -0,001235 dan berdasarkan uji T (Parsial) berarti nilai variabel indeks harga konsumen ( $X_1$ ) memiliki pengaruh negatif terhadap upah minimum provinsi (Y) di Indonesia tahun 2009-2018. Maksudnya adalah jika terjadi peningkatan terhadap indeks harga konsumen 1% maka akan menurunkan upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018 sebesar 0,001235%. Nilai koefisien  $b_2$  sebesar 2,539602 dan berdasarkan uji T (Parsial) berarti nilai variabel angkatan kerja ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap upah minimum provinsi (Y) di Indonesia tahun 2009-2018. Maksudnya adalah jika terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja 1% maka akan menambah upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018 sebesar 2,539602%.
3. Nilai koefisien  $b_3$  sebesar 0,252977 dan berdasarkan uji T (Parsial) berarti nilai variabel produk domestik regional bruto ( $X_3$ ) memiliki pengaruh positif terhadap upah minimum provinsi (Y) di Indonesia tahun 2009-2018. Maksudnya adalah jika terjadi peningkatan produk domestik

regional bruto 1% maka akan menambah upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018 sebesar 0,252977%.

#### 5.1.5 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur besar pengaruh seluruh variabel bebas (indeks harga konsumen, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto) terhadap variabel terikat dalam bentuk persentase. Pengukurannya adalah dengan cara menghitung angka koefisien determinasi ( $R^2$ ). Semakin besar nilai koefisien determinasi (mendekati 1), maka akan semakin besar sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan dari hasil olahan dapat dilihat bahwa nilai  $R^2$  adalah 0,749098. Hal ini menggambarkan bahwa indeks harga konsumen, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto berkontribusi (berpengaruh) terhadap variasi upah minimum provinsi selama kurun waktu 2009-2018 sebesar 74,9% sedangkan sisanya sebesar 25,1% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini.

#### 5.1.6 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah variable bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variable terikat. Dengan ketentuan yaitu:

Jika  $F_{\text{probabilitas}} < \alpha 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

Jika  $F_{\text{probabilitas}} > \alpha 0,05$  maka  $H_0$  diterima

Dari hasil uji F, diketahui bahwa nilai  $F_{\text{prob}}$  sebesar  $0,000000 < \alpha 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variable indeks harga konsumen, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018.

#### 5.1.7 Uji T

Uji T digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara parsial (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Uji T dapat dilakukan dengan membandingkan T probabilitas dengan  $\alpha$  0,05. Dengan ketentuan antara lain:

Jika T Probabilitas  $< \alpha$  0,05 maka  $H_0$  ditolak

Jika T Probabilitas  $> \alpha$  0,05 maka  $H_0$  diterima.

Berikut adalah penjelasan mengenai uji T

- a. Pengujian Pengaruh Indeks Harga Konsumen Terhadap Upah Minimum Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018

Berdasarkan hasil dari uji T diketahui nilai T prob. secara parsial adalah sebesar  $0,0277 < \alpha$  0.05 maka  $H_0$  ditolak. Hal tersebut berarti secara parsial indeks harga konsumen memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018.

- b. Pengujian Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Upah Minimum Provinsi Terhadap Upah Minimum Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018

Berdasarkan hasil dari uji T (parsial), diketahui nilai T prob secara parsial adalah sebesar  $0,0000 < \alpha$  0.05 maka  $H_0$  ditolak. Hal tersebut berarti secara parsial angkatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018.

- c. Pengujian Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Upah Minimum Provinsi Terhadap Upah Minimum Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018

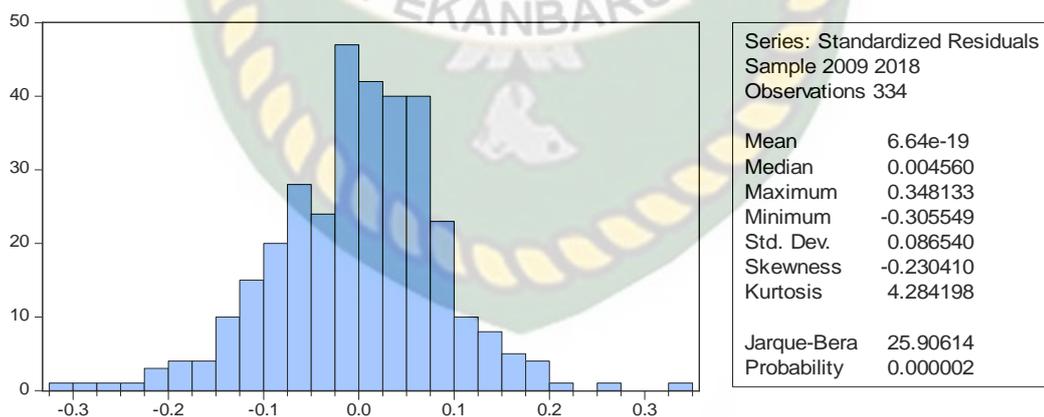
Berdasarkan hasil dari uji T (parsial), diketahui nilai T prob secara parsial adalah sebesar 0,0000  $\alpha < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Hal tersebut berarti secara parsial produk domestik regional bruto mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018.

#### 5.1.8 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah data yang bersifat normal. Metode yang digunakan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi residual yaitu dengan uji Jarque-Bera.

Gambar 5.1. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 9

Dari hasil estimasi, nilai J-B sebesar  $25,90614 < X^2 43,77297$  maka model regresi tersebut memiliki distribusi yang tidak normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana terjadinya satu atau lebih variabel bebas yang berkorelasi sempurna dan mendekati sempurna dengan variabel bebas lainnya. Sebagai aturan main yang kasar (rule of thumb), jika koefisien korelasi cukup tinggi katakanlah diatas 0.85 maka diduga ada multikolinieritas dalam model, dan sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka diduga model tidak mengandung unsur multikolinieritas (Widarjono 2018: 104).

Tabel 5.7 Hasil Uji Multikolinieritas

	$X_1$	$\text{Log}X_2$	$\text{Log}X_3$
$X_1$	1,000000	-0,097030	0,032528
$\text{Log}X_2$	-0,097030	1,000000	0,824797
$\text{Log}X_3$	0,032528	0,824797	1,000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 9

Berdasarkan hasil uji pengolahan data diatas, dapat dilihat bahwa ada *Correlation matrix* dari *rule of thumbs* namun lebih kecil dari koefisien determinasi model sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model tersebut tidak mengalami masalah multikolinieritas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu pengamatan kepengamatan lain yang berbeda. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas diuji dengan uji Glejser. Uji Glejser dapat dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai *absolute residual*. Jika

nilai probabilitas  $< 0,05$  (taraf signifikan atau  $\alpha = 0,05$ ) maka terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 07/18/20 Time: 17:51

Sample: 2009 2018

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (unbalanced) observations: 334

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.813853	0.581354	1.399927	0.1626
X1	-8.84E-05	0.000312	-0.283449	0.7770
LOGX2	-0.058349	0.111728	-0.522242	0.6019
LOGX3	-0.026286	0.018543	-1.417541	0.1574
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.256054	Mean dependent var	0.065802	
Adjusted R-squared	0.165879	S.D. dependent var	0.056091	
S.E. of regression	0.051228	Akaike info criterion	-3.000896	
Sum squared resid	0.779433	Schwarz criterion	-2.578704	
Log likelihood	538.1496	Hannan-Quinn criter.	-2.832562	
F-statistic	2.839514	Durbin-Watson stat	1.493464	
Prob(F-statistic)	0.000001			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 9

Berdasarkan tabel diatas, nilai probabilitas setiap variabel bebas tidak ada yang signifikan ( $p \text{ value} > 0,05$ ). Hal tersebut menyatakan bahwa didalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Pengujian ini mempunyai arti bahwa hasil satu tahun tertentu dipengaruhi tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson. Metode pengujiannya sebagai berikut:

- a) Jika  $DW < dL$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi positif.
- b) Jika  $DW > 4-dL$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi negatif.
- c) Jika  $dU < DW < 4-dU$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.
- d) Jika  $DW$  terlatak diantara  $dL$  dan  $dU$  atau diantara  $(4-dU)$  dan  $(4-dL)$  maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (ragu-ragu).

Dimana,  $\alpha = 5\%$ ,  $k = 4$ ,  $n = 34$ .

$$dL = 1.2078$$

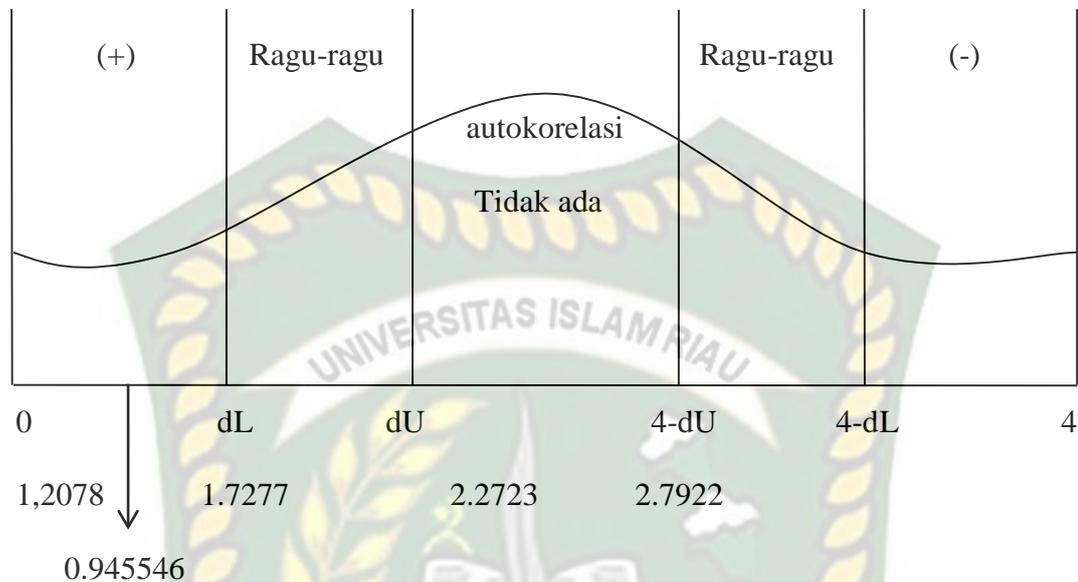
$$4-dL = 2.7922$$

$$dU = 1.7277$$

$$4-dU = 2.2723$$

$$DW \text{ Statistik} = 0.945546$$

Gambar 5.2. Hasil Uji Autokorelasi



Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa data pengamatan terdapat gejala autokorelasi karena nilai DW statistik  $0.945546 < dL 1.2078$ .

## 5.2. Pembahasan

Setelah melakukan pengujian hipotesis dan estimasi pada model maka akan ditelaah lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum provinsi di Indonesia. Dibawah ini merupakan hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas terhadap upah minimum provinsi di Indonesia:

### 1. Pengaruh Indeks Harga Konsumen Terhadap Upah Minimum Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018

Berdasarkan hasil penelitian diatas, secara parsial variabel indeks harga konsumen diketahui memiliki nilai T prob sebesar  $0.0277 < \alpha 0.05 H_0$  ditolak, maka variabel indeks harga konsumen memiliki pengaruh signifikan terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018. Artinya bahwa tinggi rendahnya indeks harga konsumen memiliki pengaruh terhadap

naik turunnya upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018. Kemudian diketahui koefisien regresi angkatan kerja sebesar -0.001235 menunjukkan bahwa angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap nilai upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan indeks harga konsumen 1%, maka juga akan menurunkan upah minimum provinsi di Indonesia sebesar 0,001% pada periode 2009-2018. Hal ini sesuai teori *cost push inflation* yaitu dimana kondisi kenaikan biaya produksi yang berimbas kepada naiknya harga-harga barang dipasar. Ketika terjadi peningkatan harga-harga barang/ inflasi akan mengakibatkan nilai upah riil atau nilai upah tenaga kerja menurun. hal ini disebabkan karena perusahaan tidak sanggup memberikan upah yang tinggi karena kenaikan harga. Hasil penelitian yang telah dilakukan memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Armidi, Erfit, dan Yulmardi (2018), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa indeks harga konsumen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrika Nurtyas (2016) yang menyatakan bahwa variabel indeks harga konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi di pulau jawa tahun 2010-2014.

2. Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Upah Minimum Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018

Berdasarkan hasil penelitian diatas, secara parsial variabel angkatan kerja diketahui memiliki nilai T prob sebesar  $0.0000 < \alpha 0.05$   $H_0$  ditolak, maka variabel angkatan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018. Artinya bahwa tinggi

rendahnya jumlah angkatan kerja memiliki pengaruh terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018. Kemudian diketahui koefisien regresi angkatan kerja sebesar 2.539602 menunjukkan bahwa angkatan kerja berpengaruh positif terhadap nilai upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja 1%, maka juga akan menaikkan upah minimum provinsi di Indonesia sebesar 2.54% pada periode 2009-2018. Peningkatan pada penawaran tenaga kerja akan mempengaruhi tingkat upah yang akan ditetapkan. Hasil di atas tidak sama dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan penawaran tenaga kerja akan menurunkan upah. Hasil tersebut terjadi karena Indonesia memiliki banyak kawasan industri sehingga memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta didukung oleh biaya hidup yang naik dari tahun ketahun dan menyebabkan penawaran tenaga kerja yang meningkat sulit untuk menurunkan upah.

3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Upah Minimum Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2018

Berdasarkan hasil penelitian di atas, secara parsial variabel produk domestik regional bruto diketahui memiliki nilai T prob sebesar  $0.0000 < \alpha$  0.05  $H_0$  ditolak, maka variabel produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018. Artinya bahwa tinggi dan rendahnya produk domestik regional bruto memiliki pengaruh terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018. Kemudian diketahui koefisien regresi produk domestik regional bruto sebesar 0.252977 menunjukkan produk domestik regional bruto

memiliki pengaruh positif terhadap nilai upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan produk domestik regional bruto 1%, maka juga akan menaikkan nilai upah minimum provinsi di Indonesia sebesar 0.25% periode 2009-2018. Adanya pengaruh variabel PDRB terhadap upah minimum provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja buruh di Indonesia termasuk baik karena setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja buruh, maka keuntungan para pengusaha juga akan meningkat. Para pengusaha pun tidak perlu cemas dengan adanya kenaikan upah minimum provinsi, karena dengan adanya kelebihan keuntungan dari hasil produksi yang meningkat maka para pengusaha akan sanggup membayar tanggungan upah minimum provinsi. Hasil penelitian yang telah dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrika Nurtyas (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa produk domestik regional bruto memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi, hal ini terjadi karena penelitian yang dilakukan oleh Febrika dilakukan dalam jangka waktu yang pendek yaitu 5 tahun.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018, maka indeks harga konsumen berpengaruh signifikan dan negatif terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018, Jumlah angkatan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018, dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan dan positif terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009-2018

#### 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hanya terdapat tiga variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Maka dari itu, untuk peneliti lain yang berniat untuk meneliti topik ini diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang juga mempengaruhi upah minimum provinsi seperti: inflasi, pertumbuhan ekonomi, PAD, dan lain-lain agar penelitian ini dapat lebih lengkap dan sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfida. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Armidi, Erfit, dan Yulmardi. 2018. “Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks harga konsumen terhadap upah minimum provinsi Jambi” e-Jurnal Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan, Volume 7 Nomor 1, Januari-April 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Indeks Harga Konsumen*. Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Indeks Harga Konsumen*. Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Jumlah Angkatan Kerja*. Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Deliarnov. 1995. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Karya, Detri. 2016. *Makro Ekonomi Pengantar untuk Manajemen*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Kristanto, Karno. 2018. “Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terdidik di Kota Pekanbaru 2005-2016” Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau.
- M.L. Jhingan. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta, RajawaliPers.
- Mangkoesebroto, Guritno & Algifari. 1998. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta, Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Mankiw, Gregory. 2006. *MakroEkonomi Edisi Keenam*. Jakarta Timur, Penerbit Erlangga.
- Mankiw, Gregiry & Quah, Euston, dkk. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta Selatan, Salemba Empat.

Miswar. 2018. “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah pekerja di Aceh”. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 5 Nomor 1, Mei 2018.

Nurtiyas, Febrika. 2016. “Analisi faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum provinsi di plau jawa tahun 2010-2014”. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Putra, Windhu. 2018. *Perekonomian Indonesia*. Depok, Rajawali Pers.

Simanjuntak, Payaman J. 2006. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta, LPFE UI.

Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta, Kencana.

Sukirno, Sadono. 2011. *MakroEkonomiTeoriPengantar*. Jakarta Rajawali Pers.

Sukirno, Sadono. 2015. *MikroEkonomiTeoriPengantar*. Jakarta, Rajawali Pers.

Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Supranto, Johan. 2016. *Statistik Teori & Aplikasi*. Jakarta, Penerbit Erlangga.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Widarjono, Agus. 2018. “Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya disertai panduan eviews”. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

[www.bps.go.id/dynamictable/2015/10/07/956/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi-2010-2016-miliar-rupiah-.html](http://www.bps.go.id/dynamictable/2015/10/07/956/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi-2010-2016-miliar-rupiah-.html)